



**PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN**



LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TAPIN**

2023



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Tapin Tahun 2022 dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Bappelitbang melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2022 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKjIP pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan (LKjIP) Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022. Semoga (LKjIP) Tahun anggaran 2022 ini dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.



Pontau, Februari 2023
KEPALA BAPPELITBANG


Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda



EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin tahun 2022 ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tahun 2022 yang telah disepakati antara Kepala Bappelitbang dengan Bupati Tapin.

Terdapat 2 (dua) kinerja utama dan 5 (lima) indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018-2023 serta Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Nomor: 970/71/Bappelitbang/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tahun 2021.

Rata-rata pencapaian indikator kinerja tersebut secara keseluruhan mencapai 108.86 persen atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Adapun, 4 (Empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan masuk ke dalam kriteria Baik Sekali (BS) karena memiliki nilai kinerja diatas 100 persen, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja utama yang ditetapkan masuk ke dalam kriteria Baik (B) karena memiliki nilai kinerja 80%. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Score 8,1	Score 6,56	80%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	90%	124.27%	138.07%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	90%	93.59%	103.98%
2.	Meningkatnya Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	90%	100%	111.11%
		Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	90%	100%	111.11%
RATA-RATA					108.86%

Pencapaian target indikator kinerja utama tersebut didukung dengan melaksanakan 4 program dengan 15 kegiatan dan 46 Sub-kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.833.194.045,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp9.762.449.258,00 atau 76,07%. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai realisasi anggaran sebesar 100% yang disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan. Namun kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tapin pada umumnya dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan pada khususnya.

Rantau, Februari 2023

KEPALA BAPPELITBANG



Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD	3
1.3. DUKUNGAN SUMBER DAYA	15
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	23
1.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	23
1.6. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	29
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	31
2.3. PERJANJIAN KINERJA	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	43
4.2. REALISASI ANGGARAN	87
BAB IV PENUTUP	104
Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nominatif PNS	16
Tabel 1.2 Sarana-Prasarana Kantor Bappelitbang Kabupaten Tapin	21
Tabel 1.3 Progres Nilai SAKIP Bappelitbang Tahun 2018-2021	26
Tabel 1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Bappelitbang Tahun 2021	26
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Bappelitbang 2018-2023	30
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin	32
Tabel 2.3 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Bappelitbang Tahun 2022	38
Tabel 3.1 Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022	45
Tabel 3.2 Capaian atas Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja Utama 1 Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022	46
Tabel 3.3 Skala Index	47
Tabel 3.4 Capaian atas Indikator Kinerja Utama 2 Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022	49
Tabel 3.5 Capaian atas Sasaran Strategis 3 Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022	49
Tabel 3.7 analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Jangka Menengah	52
Tabel 3.8 Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya	73
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2022	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Akuntabilitas Kinerja	1
Gambar 2. Hubungan Perencanaan dengan Kinerja	2
Gambar 3. Bagian Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	14
Gambar 4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan	19
Gambar 5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	19
Gambar 6. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	20



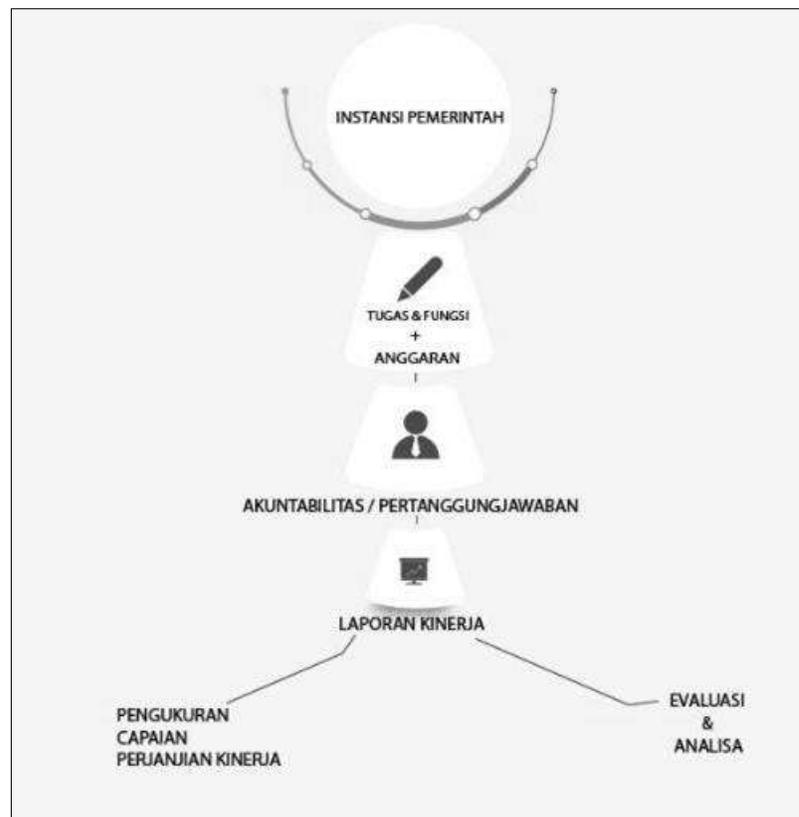
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas SAKIP Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2021	106
Lampiran 2. Surat Keputusan TIM SAKIP Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2019	110
Lampiran 3. Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin	115
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022	122
Lampiran 5. Perubahan Perjanjian Kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022	134
Lampiran 6. Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Bappelitbang Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022	145
Lampiran 7. Pohon Kinerja (Cascading) Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022	167
Lampiran 8. Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis Bappelitbang 2022	168
Lampiran 9. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Capaian Kinerja Tahun 2022	169
Lampiran 10. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Bappelitbang Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022	174
Lampiran 11. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021, Persiapan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Persiapan Penyusunan Dokumen Laporan LkjIP Bappelitbang.	182
Lampiran 12. Review Draft Dokumen LkjIP Bappelitbang Kabupaten Tapin oleh Tim Sakip Bappelitbang	186
Lampiran 13. Cross Cutting Bappelitbang Tahun 2022	188
Lampiran 14. Standar Operasional Prosedur Bappelitbang Kabupaten Tapin	198
Lampiran 15. Tindak Lanjut Sosialisasi Kertas Kerja Evaluasi AKIP	200
Lampiran 16. Tindak Lanjut LHE AKIP Bappelitbang Tahun 2021	203

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

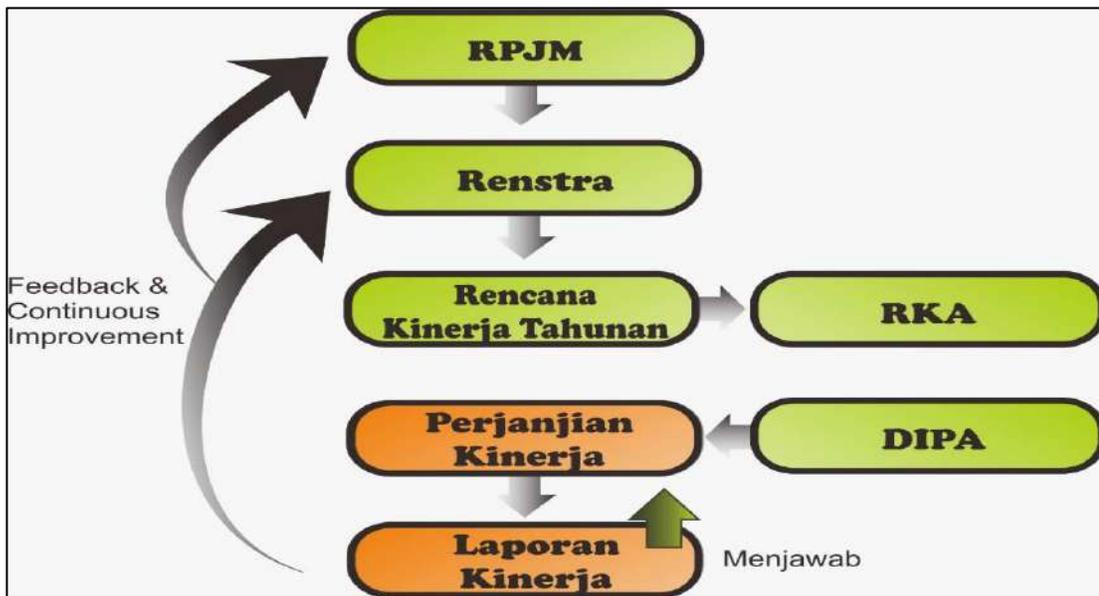
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran yang telah digunakan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 perihal Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



GAMBAR 1. AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program

dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya.



GAMBAR 2. HUBUNGAN PERENCANAAN DENGAN KINERJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pada Pasal 46 ayat (3) Badan Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pasal 46 ayat (4) berbunyi: Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Selanjutnya Pada pasal 46 ayat (5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.2. GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang tugas membantu Bupati dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Urusan-urusan yang dilaksanakan dimaksud juga mencakup tugas-tugas Pemerintah yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui azas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin dibidang perencanaan daerah dituntut untuk mampu menyiapkan perencanaan daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementatif, efektif, realistis dan berorientasi pada masyarakat dan daerah, serta dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian dokumen perencanaan yang dihasilkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menjadi acuan seluruh satuan kerja perangkat daerah/instansi dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kabupaten Tapin.

Dasar hukum pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok “menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan” di Kabupaten Tapin.



1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbang Kabupaten Tapin

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi dan infrastruktur;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan sumber daya manusia;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- h. pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Adapun uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi dan infrastruktur;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan sumber daya manusia;
6. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
7. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
8. pengelolaan kesekretariatan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin terdiri dari:

1.2.2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan berjalan secara efektif dan efisien. Uraian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. mengoordinasikan, membina, mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah;
- d. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dengan OPD dan BUMN/BUMD melalui Musrenbang dan Rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program;
- e. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD;
- f. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya;
- g. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi;
- h. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- i. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;



- j. mengoordinasikan dan membina secara teknis dan administratif serta mendelegasikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- k. mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

1.2.3. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dalam menyusun rencana, program, dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, membina dan menata organisasi dan tata laksana, mengelola barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, mengoordinir pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bappelitbang;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari:

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan lingkup Bappelitbang;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;

(3) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Bappelitbang.

1.2.4. Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka integrasi (keterpaduan perencanaan) dan sinkronisasi (penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku) perencanaan pembangunan, perencanaan pembiayaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- d. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- f. Penyusunan program, pengordinasian sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;

- g. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah
- k. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. Penyusunan dan pengelolaan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- m. Pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan dan pengendalian.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencanaan : mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan.
2. Sub Bidang Pengendalian : mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengendalian pembangunan daerah.

1.2.5. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi :



- a. penyusunan Rencana Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- c. pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- d. evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Ekonomi Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah

Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

1.2.6. Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia

Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- d. evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan



- Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

1.2.7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- c. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- f. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian, Sekretariat Daerah, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.



1.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional

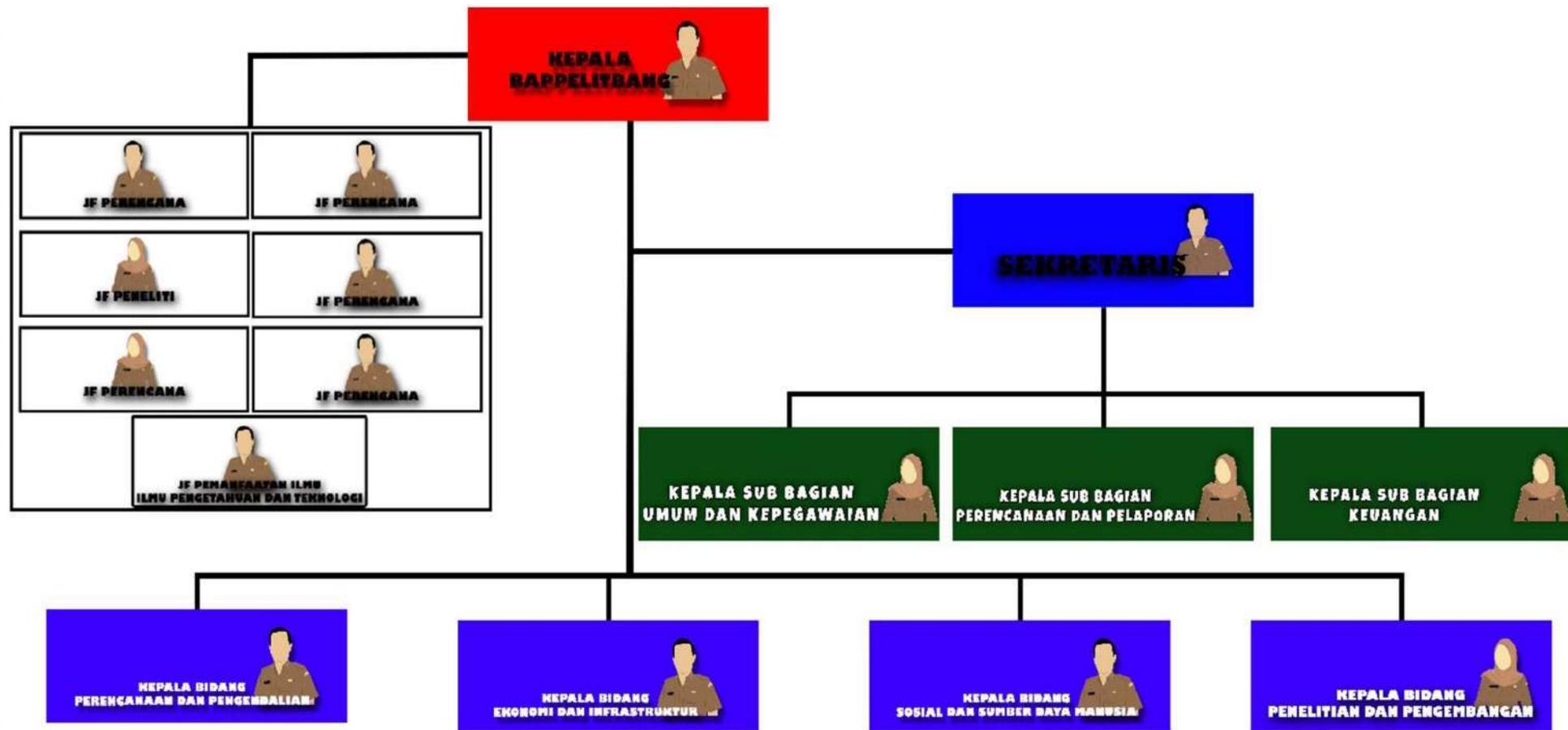
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak akhir tahun 2021, Bappelitbang Kabupaten Tapin telah memiliki beberapa ASN yang termasuk Jabatan Fungsional sebagai akibat dari penyetaraan jabatan. Kelompok Jabatan Fungsional ini telah mengisi kebutuhan ASN Bappelitbang sesuai urusan yaitu di bidang Perencanaan dan Penelitian.

1.2.9. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis, diatur sendiri dengan Peraturan Bupati. Bappelitbang Kabupaten Tapin tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis.

GAMBAR 3: BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN





1.3. DUKUNGAN SUMBER DAYA

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, Sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Kinerja sumber daya manusia merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan persepsi tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukkan jumlah energi (fisik atau mental) yang digunakan oleh individu untuk menjalankan suatu tugas. Dukungan sumber daya manusia yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menurut jabatan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:



TABEL 1.1 DATA NOMINATIF PNS

No	NIP	Nama	Gelaran Depan	Gelaran Belakang	Golongan Ruang			Jabatan		Pendidikan	
					Gol. Ruang Terakhir	Masa Kerja		Jenjang Jabatan	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan Terakhir	Program Studi/Jurusan
						Thn	Bl n				
1	2	3	4	5	12	14	15	16	18	19	21
1	19690214199 4031011	ZAINAL AQLI	Dr. H.	ST, MT	IV/c	28	04	Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II.b)	Kepala	S.3/ sederajat	Doktor Ilmu Administrasi
2	19840522200 8031001	MEIDY HARRIS PRAYOGA	Dr. H.	SE, ME	IV/a	14	04	Administrator (setara eselon III)	Sekretaris	S.2/Profesi/ sederajat	Magister Ekonomi Pembangunan
3	19790507200 5012015	MAHDIATI	-	SP, M.Ling	IV/a	17	06	Administrator (setara eselon III)	Kabid Penelitian dan Pengembangan	S.2/Profesi/ sederajat	Magister Pengelolaan SDA dan Lingkungan
4	19780804200 6041004	ZULFIAN RADMI	-	ST,M.Eng	IV/a	16	03	Administrator (setara eselon III)	Kabid Perencanaan & Pengendalian	S.2/Profesi/ sederajat	Magister Perencanaan Kota dan Daerah
5	19710823199 3031004	PAJAR SAFARI	H.	S.Sos	III/d	29	04	Administrator (setara eselon III)	Kabid Ekonomi & Infrastruktur	S.1/D-IV/ sederajat	Administrasi Negara
6	19750409200 8031001	MUHAMAD KHAIR RANI	-	SE	III/d	14	04	Administrator (setara eselon III)	Kabid Sosial dan SDM	S.1/D-IV/ sederajat	Ekonomi Pembangunan
7	19761214200 9011002	ARIF RAHMAT D	-	S. Sos	III/d	13	02	Pengawas (setara eselon IV)	JF Pemanfaatan Iptek	S.1/D-IV/ sederajat	Administrasi Negara

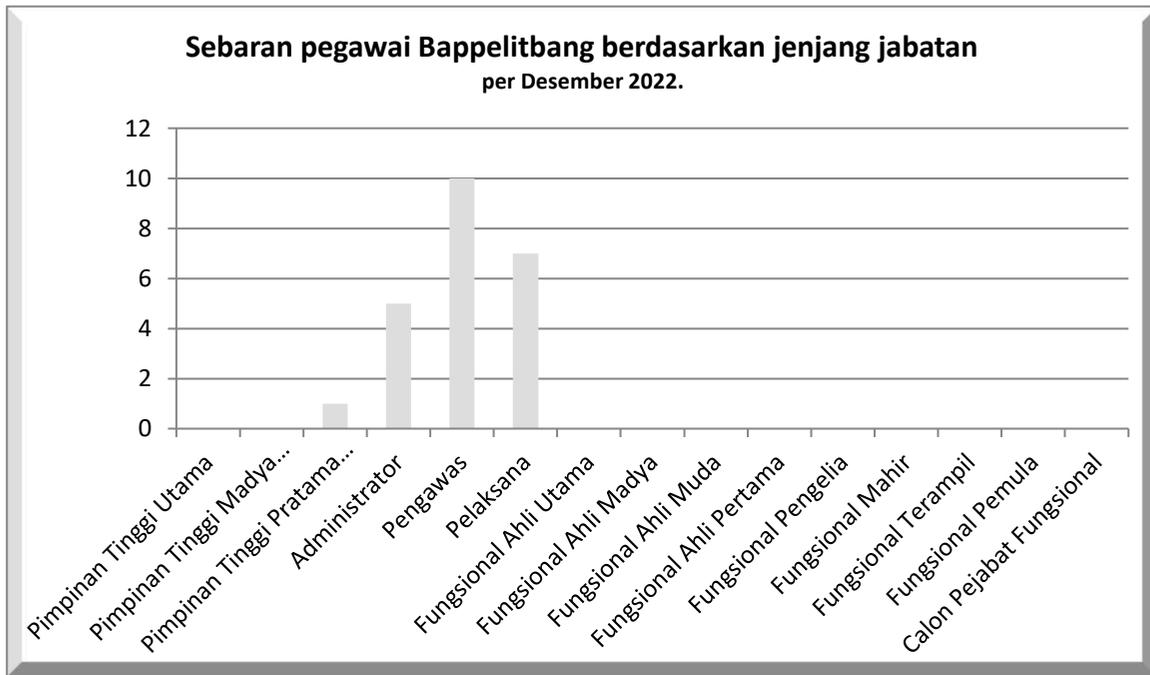


No	NIP	Nama	Gelar Depan	Gelar Belakang	Golongan Ruang			Jabatan		Pendidikan	
					Gol. Ruang Terakhir	Masa Kerja		Jenjang Jabatan	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan Terakhir	Program Studi/Jurusan
						Thn	Bl n				
8	198405042010012024	RIRY MAGRIATY	-	SE, M.Si	III/d	12	06	Pengawas (setara eselon IV)	JF Peneliti	S.2/Profesi/sederajat	Magister Sains Ilmu Perencanaan Wilayah
9	198501122009042004	SITI NUR AZIZAH	-	S. Kom	III/d	13	03	Pengawas (setara eselon IV)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S.1/D-IV/sederajat	Sistem Informasi
10	198408012010012023	AGUSTIN CAROLINA	-	SE. MM	III/d	12	06	Pengawas (setara eselon IV)	Kasubbag Keuangan	S.2/Profesi/sederajat	Magister Manajemen
11	198510302019032001	FAJAR SURI KUSUMA W	-	SE	III/a	03	04	Pengawas (setara eselon IV)	Plt. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	S.1/D-IV/sederajat	Ekonomi Pembangunan
12	197609302014062006	EVI SELVI ADS	-	ST	III/c	8	11	Pengawas (setara eselon IV)	JF Perencana	S.1/D-IV/sederajat	Teknik Sipil
13	198307172015031002	UCI SANUSI	-	SE	III/c	07	05	Pengawas (setara eselon IV)	JF Perencana	S.1/D-IV/sederajat	Ekonomi Manajemen
14	198606132015031001	ARIEF FITRIANTO	-	SE	III/c	07	04	Pengawas (setara eselon IV)	JF Perencana	S.1/D-IV/sederajat	Ekonomi Manajemen
15	199201292015031001	M.HILMI JAMALUDDIN	-	SE	III/c	07	04	Pengawas (setara eselon IV)	JF Perencana	S.1/D-IV/sederajat	Ekonomi Manajemen
16	197304152006041013	NOR IFANSYAH	-	S. Kom	III/c	16	06	Pengawas (setara eselon IV)	JF Perencana	S.1/D-IV/sederajat	Sistem Informasi



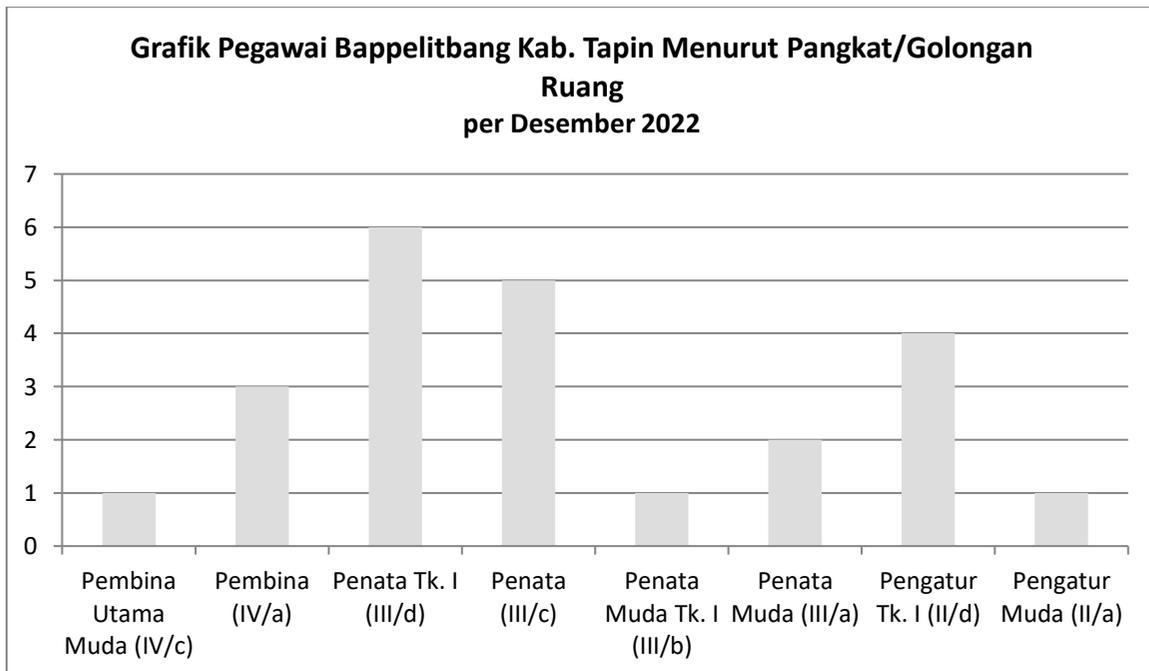
No	NIP	Nama	Gelar Depan	Gelar Belakang	Golongan Ruang			Jabatan		Pendidikan	
					Gol. Ruang Terakhir	Masa Kerja		Jenjang Jabatan	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan Terakhir	Program Studi/Jurusan
						Thn	Bl n				
17	19720220199 3032003	LILI DAMAYANTI	Hj.		III/b	29	04	Pelaksana	Pengadministra si Program dan Tata Operasiomal Penelitian	SLTA/D- I/ sederajat	IPS
18	19650518200 7012013	IRIYANI	-		III/a	15	08	Pelaksana	Pengadministra si Umum	D-III/Sarjana Muda/ sedera jat	Administrasi Pembangunan
19	19741218200 9012002	SUMIATI	-		II/d	13	05	Pelaksana	Pengadministra si Perencanaan & Program	D-III/Sarjana Muda/ sedera jat	Akuntansi
20	19750715200 9012004	FARIDAH ARIANI	-	A. Md	II/d	13	05	Pelaksana	Pengadministra si Perencanaan & Program	D-III/Sarjana Muda/ sedera jat	Akuntansi
21	19750901200 9011006	MUHAMMAD SYAHDANI	-	A. Md	II/d	13	05	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	D-III/Sarjana Muda/ sedera jat	Akuntansi
22	19780415200 9012005	SITI MARFUAH	-	A. Md	II/d	13	05	Pelaksana	Pengadministra si Keuangan	D-III/Sarjana Muda/ sedera jat	Akuntansi
23	19730810201 2122003	ISNANIAH	-		II/a	11	03	Pelaksana	Pengadministra si Program & Tata Operasional Penelitian	SLTP/ sederaj at	

Berdasarkan data tabel 1 diatas maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan jenjang jabatan yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



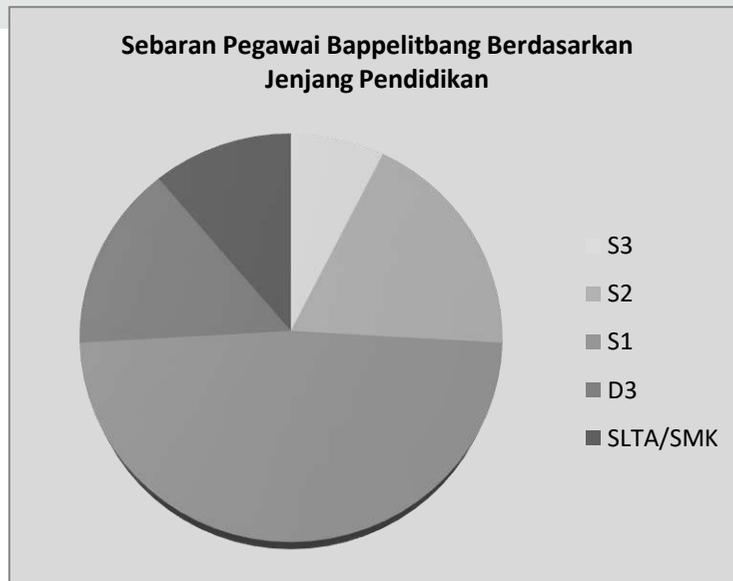
GAMBAR 4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG JABATAN

Berdasarkan data Tabel 1 diatas maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan golongan ruang yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



GAMBAR 5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

Berdasarkan data juga maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan jenjang pendidikan yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



GAMBAR 6. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

1.3.1. Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana kantor adalah dua hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor guna mencapai tujuan suatu organisasi. Dimana sarana merupakan fasilitas yang dapat dilihat serta di gunakan oleh karyawan dalam menyelesaikan tugas kantor. Contohnya; gedung, ruangan kantor, peralatan, mesin kantor. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang tidak berwujud, namun menjadi pedoman karyawan dalam bekerja. Untuk itu, guna mencapai tujuan organisasi, suatu kantor harus dapat menjamin dan menyediakan fasilitas yang menunjang keberhasilan karyawannya dalam bekerja. Karena jika suatu kantor hanya mengandalkan tenaga karyawannya saja tanpa di dukung dengan fasilitas yang memadai, tentu karyawan akan bekerja dengan kurang maksimal dan segala aktivitas kantor tidak dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, tujuan dari organisasi itu sendiri tidak tercapai. Dukungan sumber daya manusia sarana dan prasarana yang ada pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin bisa dilihat pada Tabel 1.2 berikut:



TABEL 1.2 SARANA-PRASARANA KANTOR BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN

NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	STATUS BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4	8
Sepeda Motor	8	Buah	Digunakan sendiri	Motor honda Supra NF DA.838.K, Motor suzuki thunder DA.5305.K, Motor suzuki axelo DA.507.KG, Motor Yamaha Vixion (DA.5301.KT, DA.5302.KT, DA.5303.KT, DA. 5304.KT, DA.5299.KT)
Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	2	Buah	Digunakan sendiri	Mobil Toyota Innova DA.1792.KI dan Mobil Toyota Avanza DA.802.KE
Transportable Generating Set	1	Unit	Digunakan sendiri	
AC	29	Unit	Digunakan sendiri	
Tablet	3	Unit	Digunakan sendiri	
Monitor	2	Unit	Digunakan sendiri	
PC. Unit	40	Unit	Digunakan sendiri	
Printer	24	Unit	Digunakan sendiri	
Laptop	25	Unit	Digunakan sendiri	
Ipad	5	Unit	Digunakan sendiri	
Video Wall	1	Unit	Digunakan sendiri	
Televisi	9	Unit	Digunakan sendiri	
Kulkas	3	Unit	Digunakan sendiri	
Amplifier	2	Unit	Digunakan sendiri	
Speaker	7	Buah	Digunakan sendiri	
Camera	6	Unit	Digunakan sendiri	
Server	1	Unit	Digunakan sendiri	
UPS	3	Buah	Digunakan sendiri	
Hardisk Eksternal	5	Buah	Digunakan sendiri	
Dispenser	2	Buah	Digunakan sendiri	
Scanner	7	Buah	Digunakan sendiri	
GPS	1	Unit	Digunakan sendiri	
Exhause Fan	5	Buah	Digunakan sendiri	
Stabilizer	7	Buah	Digunakan sendiri	
Card Reader	1	Unit	Digunakan sendiri	
Router	1	Buah	Digunakan sendiri	
Michrophone	3	Buah	Digunakan sendiri	
Audio Mixer	2	Buah	Digunakan sendiri	
OHP	8	Buah	Digunakan sendiri	



NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	STATUS BARANG	KETERANGAN
UPS	5	Buah	Digunakan sendiri	
Drone	1	Buah	Digunakan sendiri	
Recorder Display	1	Buah	Digunakan sendiri	
Vacum Cleaner	1	Buah	Digunakan sendiri	
Humidifier	2	Buah	Digunakan sendiri	
Video Monitor	1	Buah	Digunakan sendiri	
Lemari	34	Buah	Digunakan sendiri	
Meja	66	Buah	Digunakan sendiri	
Kursi	118	Buah	Digunakan sendiri	
Sofa	11	Buah	Digunakan sendiri	
Kitchen Set	1	Set	Digunakan sendiri	
Podium	1	Buah	Digunakan sendiri	



1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menemukan potensi dalam pelayanan. Adapun potensi pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas.
2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas
3. Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan proses perencanaan terutama untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perencanaan pembangunan daerah.
4. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi pedoman teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
6. Peningkatan hubungan timbal balik dengan pihak eksternal terkait penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
7. Komitmen Kepala Daerah terhadap konsistensi program pembangunan daerah

1.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat:

1. Perlu ditambahkan SDM perencana yang berkualitas

Tugas yang diemban aparat perencana mampu secara professional melaksanakan tugas pokoknya, dan mampu berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan upaya proses pembelajaran yang berkesinambungan. Peningkatan kualitas Sumberdaya Perencana di instansi pemerintah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan saja (kognisi, afeksi dan psikomotor), namun pengembangan juga didasarkan pada upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan sehingga kualitas output perencanaan yang dihasilkan dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Untuk itu sebagai aparatur perencana, ke depan lebih dituntut untuk berkontribusi dan

berpartisipasi aktif dalam keberhasilan pembangunan berdasarkan atas kegiatan perencanaan yang dilakukannya. Dalam hal tersebut melihat kondisi yang ada sekarang di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin kurang cukup mempunyai aparat perencana sehingga cukup mengganggu pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dalam memaksimalkan kinerjanya.

2. Kurangnya SDM peneliti.

Analisis Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah. Kurangnya analisis peneliti di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menyebabkan kurang berkembangnya penelitian dan pengembangan terutama dalam hal inovasi daerah yang berguna dalam menunjang pembangunan daerah.

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone pun turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan masyarakat luas. Selain dari Aplikasi “e-tamasa” dan “e-office” yang sebelumnya telah dikembangkan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin juga telah mengembangkan “e-starlitbang” yang merupakan sebuah repository yang menyediakan hasil penelitian dan inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin. Selain itu, pada akhir tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin melalui bidang Perencanaan dan Pengendalian telah melakukan evaluasi dan persiapan terkait penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk menjawab keperluan ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin mulai mengembangkan sebuah aplikasi lain berupa Sistem Informasi yang dapat digunakan untuk membantu proses perencanaan pembangunan daerah yang bernama Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu dalam rangka penyusunan Rencana Strategis



(Renstra) OPD Tahun 2024-2026. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin berharap untuk dapat mengembangkan potensi digitalisasi untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien.

4. Perlu adanya SOP perencanaan, penelitian dan pengembangan secara lengkap.

SOP atau Standar Operasional Prosedur yang terstandarisasi dan eksplisit adalah aspek penting dari setiap sistem kualitas yang akan menghadirkan kemampuan untuk bekerja secara selaras dan sesuai standar yang ada. Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan proses terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten setiap waktu. SOP sering digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan atau praktik operasional dan untuk mendokumentasikan bagaimana tugas harus diselesaikan di organisasi. Di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin masih belum lengkapnya untuk Standar Operasional Prosedur sehingga belum maksimalnya standar kerja yang diterapkan hal tersebut menyebabkan cukup membuat kebingungan pegawai dalam melakukan pekerjaannya karena tidak lengkapnya standar baku dalam bekerja. Sehingga dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan berusaha untuk melakukan evaluasi terhadap SOP yang sudah ada dan berusaha untuk memperbaikinya dengan mengeluarkan SOP baru yang dinilai dapat lebih efektif dan efisien.

5. Optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja.

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta penggunaan hasil monitoring dan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan daerah selanjutnya yang dikarenakan belum adanya tindak lanjut dalam evaluasi perencanaan pembangunan yang digunakan dalam pengambilan kebijakan.

6. Pemulihan kegiatan pasca wabah *pandemic Corona Virus Desaise (Cov-19)*

Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. World Health Organization (WHO) pun menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020, dengan sudah diberlakukannya vaksinasi dan mengurangnya kasus penularan wabah pandemi Corona Virus Desease (Cov-19). Aktivitas kerja mulai

kembali seperti semula. Namun, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin berkomitmen untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

1.6. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 – 2020 sebagai berikut:

TABEL 1.3 PROGRES NILAI SAKIP BAPPELITBANG TAHUN 2018-2021

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2018	74,70	BB
2	2019	81,63	A
3	2020	85,43	A
4	2021	76,50	BB

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal, berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2021 sebagai berikut:

TABEL 1.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP BAPPELITBANG TAHUN 2021

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dengan membuat analisis pendekatan penetapan target;	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin telah melakukan analisis penetapan target kinerja pada saat penyesuaian target kinerja. Dimana analisis ini dibuat berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya.
2	Melibatkan setiap pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja, minimal terdapat absensi dan nolulen dalam perencanaan kinerja;	Penyusunan Perencanaan Kinerja selalu melibatkan seluruh pegawai Bappelitbang. Hal ini dapat dibuktikan pada rapat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dihadiri



NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		seluruh pegawai mulai dari Eselon II s.d Staf
3	Melibatkan Pimpinan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja, minimal terdapat absensi dan notulen rapat pengukuran kinerja;	Pimpinan selalu terlibat dalam mengukur capaian kinerja yang dihasilkan. Laporan evaluasi kinerja rutin dilakukan pada setiap triwulan dan dihadiri oleh pimpinan
4.	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja;	Pengukuran capaian kinerja telah dilaksanakan dan menggunakan aplikasi e-sakip V2 yang dapat diakses pada tautan berikut https://admin.esakip.tapinkab.go.id/login
5.	Melaksanakan reviu internal terhadap dokumen laporan kinerja;	Reviu internal terhadap dokumen draft LKjIP telah dilaksanakan dengan Tim SAKIP Bappelitbang sebelum disahkan.
6.	Menyajikan analisis dan evaluasi capaian dibanding dengan target nasional/internasional (<i>benchmark</i> kinerja) dalam laporan kinerja	Analisis dan evaluasi capaian Bappelitbang untuk saat ini masih belum dapat dibandingkan dengan tingkat nasional maupun internasional. Adanya perbedaan indikator dan target perencanaan dan penelitian dengan daerah lain.
7.	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai pengaruh terhadap budaya kinerja organisasi;	Informasi yang tersedia dalam dokumen LKjIP telah memberikan dampak terhadap budaya kinerja organisasi. Pemantauan Laporan Kinerja secara online melalui tautan: https://admin.esakip.tapinkab.go.id/login
8.	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara menyeluruh, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja;	Evaluasi kinerja telah dilaksanakan, evaluasi tersebut terdiri dari monev renja dan monev kinerja seperti yang terlampir pada Lampiran 11.
9.	Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bukti nyata dari kedalaman evaluasi;	Telah menyusun pedoman evaluasi kinerja dalam bentuk SOP evaluasi kinerja, dengan nomor: 970/55.a/BAPPELITBANG/2020 tanggal 4 Desember 2020
10.	Mendokumentasikan kertas kerja evaluasi sebagai bukti nyata dari kedalaman evaluasi;	Hasil penilaian KKE telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai.
11.	Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja;	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi e-sakip V2 yang dapat diakses melalui



NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		tautan https://admin.esakip.tapinkab.go.id/login
12.	Mendokumentasikan bukti tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai langkah nyata dalam implementasi SAKIP	Hasil tindak lanjut dari rekomendasi APIP telah dilaksanakan dan didokumentasikan berupa foto-foto kegiatan dan data dukung lainnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau dengan kata lain visi adalah kondisi ideal tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan dimasa depan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Tapin tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 yaitu “Bersama Mewujudkan Tapin Maju Sejahtera dan Agamis”, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Tapin sebagai salah satu organisasi perangkat daerah unsur penunjang urusan Pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan akan berperan mendukung dalam pencapaian misi ke- 5 (lima) pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 yaitu “Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*)”.

Untuk mewujudkan misi tersebut dijabarkan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL 2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN RENSTRA BAPPELITBANG 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1. Nilai SAKIP predikat 2. Opini BPK atas laporan keuangan Pemda (predikat)
2	Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

2. Sasaran

Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD
2	Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan
		Persentase hasil kelitbangan yang disitasi

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Strategi dan arah kebijakan selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan bagi setiap program yang ingin dicapai.

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan implementasi mekanisme sesuai regulasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
2	Mendorong penerapan teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian target program/kegiatan
3	Meningkatkan penyediaan dan pemuatkhiran data hasil kelitbangan	Peningkatan kualitas data kelitbangan yang digunakan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pedoman atas Indikator Kinerja Utama dalam memperkuat akuntabilitas ke dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD
2	Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan
		Persentase hasil kelitbangan yang disitasi

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait makna indikator, cara perhitungan indikator, dan penjelasan makna indikator sebagaimana dijelaskan berikut ini:



TABEL 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORM PERHITUNGAN	PENJELASAN
1	Meningkatnya kualitas kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Total score rata-rata dari (nilai proses perencanaan + nilai isian perencanaan + nilai jaminan tindak lanjut) / total score ideal x 10	Skala Kategori 1.0 ~ 2.0 Sangat kurang 2.1 ~ 4.0 Kurang 4.1 ~ 6.0 Cukup 6.1 ~ 8.0 Baik 8.1 ~ 10 Sangat baik
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	Yang dimaksud rata-rata capaian kinerja dengan perhitungan rumus: $\frac{\sum \text{Capaian kinerja setiap indikator kinerja utama setiap periode (n)}}{\sum \text{Jumlah periode sebelumnya (n - 1)}} \times 100\%$	AA >90-100 Sangat Memuaskan A >80-90 Memuaskan BB >70-80 Sangat Baik B >60-70 Baik CC >50-60 Cukup/Memadai C >30-50 Kurang D <30 Sangat Kurang
			$\frac{\sum \text{Jumlah rata - rata capaian indikator kinerja utama}}{\sum \text{Jumlah indikator kinerja utama}} \times 100\%$	WTP =100% WDP =75% TW=50 TMP=25%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	Yang dimaksud rata-rata capaian kinerja dengan perhitungan rumus: $\frac{\sum \text{Capaian kinerja setiap indikator kinerja utama SKPD setiap periode (n)}}{\sum \text{Jumlah periode sebelumnya (n - 1)}} \times 100\%$	
			$\frac{\sum \text{Jumlah rata - rata capaian indikator kinerja utama SKPD}}{\sum \text{Jumlah indikator kinerja utama}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	$\frac{\sum \text{hasil kajian kelitbangan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{hasil kelitbangan}} \times 100\%$	
		Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	Rata-rata capaian hasil dicitasi kajian kelitbangan	yang dimaksud dengan capaian hasil dicitasi adalah realisasi dicitasi kajian dibagi target dicitasi dikali 100%



2.3. PERJANJIAN KINERJA

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Manifestasi komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Perubahan Anggaran Tahun 2022 sebagai berikut:



TABEL 2.3 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANG TAHUN 2022

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon 2	a. Meningkatkan kualitas perencanaan	1. Indeks Kualitas Perencanaan	Score 8,2) (Sangat Baik)
			2. Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	90%
			3. Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	90%
		b. Meningkatkan hasil kelitbangan	1. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	90%
			2. Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	90%
2	Eselon 3 (Sekretariat)	a. Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien	1. Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	80%
			2. Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90%
		b. SDM yang berkualitas	1. Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%
3	Eselon 3 (Litbang)	a. Meningkatkan rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	1. Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100%
4	Eselon 3 (Bid Sos SDM)	a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra sub bidang Sosial dan SDM	1. Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100%



NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
		b. Meningkatnya capaian kinerja program SKPD mitra Sosial dan SDM	1. Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM	90%
5	Esselon 3 (Bid Randal)	a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		b. Meningkatnya kualitas capaian kinerja program prioritas daerah	1. Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	80%
6	Esselon 3 (Bid Eko dan Infrastruktur)	a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	1. Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
		b. Meningkatnya capaian kinerja program SKPD mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	2. Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	90%
7	Esselon 4 Sekretariat	a. Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
			2. Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
			3. persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%



NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
		b. Meningkatkan Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	1. Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%
			2. Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%
			3. Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100%
		c. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	1. Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappelitbang	Score 4.3
		d. Meningkatkan kualitas barang milik daerah	2. Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
		e. Meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas	3. Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN	100%
10	JF Pemanfaatan IPTEK (Sub Bidang Litbang Sosial Budaya)	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan sosial budaya	Persentase hasil kajian kelitbangan Sosial Budaya yang berkualitas	100%
	JF Peneliti (Sub Bidang Litbang Ekonomi)	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan Ekonomi	Persentase hasil kajian kelitbangan ekonomi yang berkualitas	100%
11	JF Perencana Sub Bidang Sosial	a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub bidang sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	1. Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang sosial selesai tepat waktu	90%



NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
		b. Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang social	2. Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang sosial yang ditindaklanjuti	100%
12	JF Perencana Sub Bidang SDM	a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	1. Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang SDM selesai tepat waktu	90%
		b. Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang SDM	2. Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang SDM yang ditindaklanjuti	100%
13	JF Perencana Sub Bidang Ekonomi	a. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	1. Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Ekonomi selesai tepat waktu	90%
		b. Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	2. Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	100%
14	JF Perencana Sub Bidang Infrastruktur	a. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	1. Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Ekonomi selesai tepat waktu	90%
		b. Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	2. Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	100%



NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
15	JF Perencana Sub Bidang Pengendalian	a. Meningkatnya kualitas kinerja Program Prioritas Daerah	1. Peningkatan capaian kinerja Program Prioritas Daerah yang tercapai	100%
		b. Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	2. Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%
16	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	1. Persentase hasil berita acara Musrenbang di semua level tingkatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%
		b. Terwujudnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah	2. Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbang Kabupaten Tapin tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Perencanaan yang sudah ditetapkan kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada berakhirnya masa tahun anggaran, perencanaan dan perjanjian kinerja ini harus diukur dan dilaporkan kepada publik.

Pengukuran kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target pada RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja merupakan

dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tahun 2022 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin berhasil atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak berhasil, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja yang dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan ini menunjukkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*)

2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang perlu ditetapkan oleh instansi pemerintah. Bappelitbang Kabupaten Tapin dalam upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, review capaian kinerja, serta permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Penjabaran analisis capaian kinerja dari Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam rangka untuk mengukur keberhasilan dari suatu sasaran strategis. Dalam meningkatkan kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Bappelitbang Kabupaten Tapin menetapkan Keputusan Kepala Bappelitbang Nomor 970/71/Bappelitbang/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang terdiri atas Sasaran Strategis sebanyak 2 (dua) kinerja utama dan 5 (lima) indikator kinerja. Hasil perhitungan dan analisis didapatkan rata-rata pencapaian indikator kinerja tersebut secara keseluruhan mencapai 108,86 persen atau masuk dalam kategori sangat berhasil. 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan masuk kedalam kriteria Baik Sekali (BS) karena memiliki nilai kinerja diatas 100 persen, dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang memiliki nilai 100 persen. Adapun hasil capaian atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin pada tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut.

TABEL 3.1 CAPAIAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	8.2 (Sangat Baik)	6.56 (Baik)	80%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	90%	124.27%	138.07%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	90%	93.59%	103.98%
2.	Meningkatnya Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	90%	100%	111.11%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
		Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	90%	100%	111.11%
RATA-RATA					108.86%

Berdasarkan hasil rerata capaian pada tabel diatas, maka kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Bappelitbang Kabupaten Tapin untuk mempertahankan prestasi kerja dan kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dalam dokumen perencanaan, diantaranya yaitu Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik dan terukur dan hasil kelitbangan lebih berorientasi kepada inovasi. Selanjutnya pencapaian indikator kinerja utama dalam setiap sasaran strategis Bappelitbang Kabupaten Tapin akan dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN

Pencapaian sasaran strategis 1 diukur melalui indikator kinerja utama 1 dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut:

TABEL 3.2 CAPAIAN ATAS SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Score 8,2	Score 6.56	80%

Kualitas perencanaan menjadi aspek penting dalam proses pembangunan. Kualitas perencanaan perlu dihadirkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dimulai dari tradisi Bappenas sejak tahun 2011 dalam memberikan apresiasi terhadap daerah yang memiliki perencanaan yang berkualitas dengan Anugerah Pangripta Nusantara/APN (sekarang namanya Penghargaan Pembangunan Daerah/PPD), banyak daerah kemudian merasa tertantang menggunakan indicator Pangripta Nusantara ini untuk mengukur kualitas perencanaan. Dokumen yang dinilai dalam Anugerah Pangripta Nusantara ini adalah dokumen Rencana Kerja Perangkat Dearah (RKPD). Adapun aspek-aspek yang diukur di dalam Anugerah Pangripta Nusantara ini adalah keterkaitan,

konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, inovasi kebijakan, proses perencanaan dari bawah (bottom up), proses perencanaan dari atas (top down), proses perencanaanteknokratik, proses perencanaan politik dan inovasi proses dan program daerah.

Namun demikian, tidak semua daerah ‘memiliki keberanian’ menggunakan indikator ini untuk mengukur kualitas perencanaannya. Hal ini terkait dengan banyak hal yang harus tersedia/disiapkan agar aspek-aspek penilaian di atas menghasilkan nilai yang baik. Hal-hal yang harus tersedia tersebut antara lain adalah political will dari pimpinan daerah, kesiapan SDM dan ketersediaan infrastruktur perencanaan. Hasilnya banyak daerah lebih memilih menggunakan indikator konsistensi antar dokumen perencanaan untuk mengukur kualitas perencanaan daerah. Kajian IKP memuat data yang diperoleh secara persepsional melalui kuesioner untuk dimensi proses penyusunan perencanaan (Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten). Data dalam dimensi isi diperoleh secara dokumentatif dan persepsional, sedangkan dimensi jaminan tindak lanjut hasil perencanaan data diperoleh melalui dokumentatif terutama RPJMD tahun 2018 - 2023, RKPD tahun 2022, serta laporan Monev Bappelitbang

Penjelasan Proses indeks adalah penghimpunan data persepsional dan dokumentatif berpedoman pada masing-masing kuesioner sebagaimana terlampir dalam kajian ini. Transformasi penilaian kuesioner kedalam skala 1-10, perhitungan nilai masing-masing dimensi atas nilai transformasi skala dan jumlah skala masing masing dimensi merupakan Indek IKP.

TABEL 3.3 SKALA INDEX

No	Skala	Kategori
1	1.0 ~ 2.0	Sangat kurang
2	2.1 ~ 4.0	Kurang
3	4.1 ~ 6.0	Cukup
4	6.1 ~ 8.0	Baik
5	8.1 ~ 10	Sangat baik

Konsep penyusunan indeks kualitas perencanaan melihat 3 dimensi perencanaan yaitu dimensi proses musrenbang, isi dokumen (RKPD dan renja OPD), jaminan tindak lanjut hasil perencanaan pada dokumen anggaran tahunan. Indeks diukur dalam skala 1 s/d 10 (kuantitatif) dan 5 jenjang kategori (kualitatif). Pengukuran yang dilakukan IKP bernilai 6.56 masuk dalam kategori Baik. Nilai ini berada dibawah target nilai yang sebelumnya ditetapkan yaitu 8.2



(Sangat Baik). Adapun hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang selanjutnya akan dianalisa dan dilakukan perbaikan untuk dapat menghasilkan perencanaan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian Sasaran satu (1) indikator Kinerja satu(1), sebagai berikut:

**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH**

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 1.164.284.100,00 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 828.856.400,00 atau 73.13% dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Peyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	883.817.500,00
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	280.466.600,00

**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp1.138.771.500,00 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp828.856.400,00 atau 72.79% dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Kordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	271.081.100,00
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp	216.005.300,00
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp	828.856.400,00

Pencapaian sasaran strategis 1 diukur melalui indikator kinerja utama 2 dan 3 dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut:

**TABEL 3.4 CAPAIAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 BAPPELITBANG
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	90%	124,27%	138.07%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	90%	93,59%	103.98%

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian Sasaran satu (1) indikator Kinerja 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai berikut:

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp**196.990.000,00** dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp**162.578.800,00** atau 82.53% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	162.578.800,00

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA HASIL KELITBANGAN

TABEL 3.5 CAPAIAN ATAS SASARAN STRATEGIS 3 BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	90%	100%	111.11%
		Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	90%	100%	111.11%

Implementasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin berbasis penelitian Ilmiah dilatarbelakangi oleh adanya



permasalahan/isu-isu strategis dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berbasis kinerja/outcome. Dengan slogan “*we are contribute for Tapin Research Development and Innovation*” Bappelitbang melaksanakan tugas dalam Penelitian ilmiah dan Inovasi yang diperlukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan/isu-isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya hasil kelitbangan diukur melalui indikator kinerja utama satu (1) Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan, dari IKU ini ada lima belas (15) OPD yang memanfaatkan hasil penelitian, untuk sasaran strategis 2 indikator kinerja dua (2) yakni Persentase hasil kelitbangan yang disitasi, dari IKU ini ada 35 (tiga puluh lima) hasil kelitbangan yang disitasi dan 15 (lima belas) OPD yang mensitasi.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijabarkan pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran dua indikator Kinerja satu dan dua sebagai berikut:

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. **1.293.829.000,00** dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. **1.027.660.900,00** atau 79.42% dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp	134.085.200,00
2	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp	245.202.000,00
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp	648.373.700,00

Dari hasil capaian pengukuran kinerja secara mandiri (self assessment) terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka dapat dianalisis pencapaian kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 dikategorikan kedalam kategori pencapaian > 100% atau “Baik Sekali” dan 75%-100% atau “Baik”.

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI dan CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021 DAN 2020



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R
IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023							
Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar						
	Persentase program prioritas yang terakomodir dalam RPJMD						
	Persentase pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah						
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan						
PERUBAHAN (1) IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023							
Terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas Dalam Dokumen Perencanaan	90%	90%				
Terpenuhinya Persentase Capaian Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja SKPD	90%	90%				
Terpenuhinya persentase <i>Policy Brief</i> bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan	Persentase <i>Policy Brief</i> bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan	80%	80%				
PERUBAHAN (2) IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R
Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan			Score 6,2	Score 7,2	Score 8,2	Score 6,56
	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah			80%	93,64%	90%	124,27%
	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD			80%	116,68%	90%	93,59%
Meningkatnya Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan			80%	100%	90%	100%
	Persentase hasil kelitbangan yang disitasi			80%	100%	90%	100%

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

Analisis capaian kinerja Bappelitbang Tahun 2022 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator kinerja dengan metode analisis membandingkan antara analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL. 3.7 ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 DENGAN JANGKA MENENGAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH	2022	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Score 8,2	Score 8,2	Score 6,56
	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	100%	90%	124,27%
	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	100%	90%	93.59%
Meningkatnya Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100%	90%	100%
	Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	100%	90%	100%

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Hasil pengukuran capaian 5 (lima) indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja tahun 2022 menunjukkan telah melampaui dari target yang sudah ditetapkan, pencapaian kinerja yang diperjanjikan dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala yang berarti. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Bappelitbang Kabupaten Tapin. Untuk lebih menunjang keberhasilan kinerja Bappelitbang mengambil beberapa langkah, antara lain:

- a. Program dan kegiatan dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien.
- b. Memberdayakan SDM yang sesuai dengan keahlian.
- c. Meningkatkan kemampuan SDM, agar kemampuannya aparatur di perencanaan lebih handal.
- d. Melaksanakan bimbingan teknis, melakukan pembinaan dan pembimbingan ataupun pendampingan agar kemampuan dan wawasan pengetahuan yang dimiliki pengelola kegiatan (PPTK) terhadap anggaran berbasis kinerja.
- e. Menumbuhkan kesadaran pada setiap birokrasi akan pentingnya penjarangan dan pengolahan data sebagai bahan informasi untuk menyusun rencana kerja agar hasil maksimal diperoleh pada setiap kegiatan.

Program-program yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Program ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Ekonomi dan Infrastruktur, dan Sosial dan Sumber Daya Manusia. Tingkat keberhasilan dari program ini bahwa program ini telah melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi SKPD Mitra Kerja Bidang Infrastruktur antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, serta Persandian dan 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten



Tapin. Dan fasilitasi dan supervisi SKPD Mitra Kerja Bidang Perekonomian antara lain Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Manfaat dari Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrstruktur ini yaitu:

- Terjalin sinegritas dan harmonisasi antar dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Lingkungan Hidup, Inspektorat, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tapin, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Bappelitbang, Persandian dan 12 Kecamatan di Kabupaten Tapin.
- Terlaksananya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Bappelitbang, Persandian dan 12 Kecamatan di Kabupaten Tapin serta Urusan Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Lingkungan Hidup, Inspektorat, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Kendala dalam Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi dan Infrastruktur:

- Adanya masa transisi endemik yang belum berakhir menyebabkan kegiatan berjalan lambat karena kegiatan yang bersifat koordinasi dengan SKPD terkait penyusunan perencanaan anggaran dan koordinasi realisasi capaian renja dilaksanakan secara hybrid.
- Adanya *refocusing* anggaran sehingga capaian realisasi SKPD mitra Ekonomi dan Infrastruktur tidak maksimal.

Program ini telah mendukung tercapainya sasaran rencana strategis Bappelitbang yaitu “Meningkatnya kualitas hasil perencanaan



pembangunan daerah” dengan rincian penjelasan dari program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung kinerja program ini yaitu:

1.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a) Monitoring dan Evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini menghasilkan 4 laporan Monitoring dan Evaluasi Mitra Bidang Infrastruktur. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sub bidang mitra bidang infrastruktur ini yaitu:

- Masih ada beberapa SKPD yang melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan oleh Bappelitbang
- Dalam pengisian format yang ditentukan, sebagian SKPD format masih tidak terisi dengan benar.
- SDM dari SKPD yang menangani Monev Perangkat Daerah sering berganti personil, sehingga pelaporan yang disampaikan tidak optimal.

- b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini melaksanakan asistensi atau pembinaan kepada Perangkat Daerah mitra bidang infrastruktur, dengan keluaran kompilasi dokumen Rencana Kerja Mitra Bidang. Dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan yaitu:

- Pelaksanaan kegiatan ini menghadapi kendala yaitu masih ada beberapa SKPD yang terlambat melaporkan Renja PD dari jadwal yang sudah ditentukan.
- Dokumen yang disampaikan oleh SKPD masih terdapat ketidaksesuaian dengan sistematika penyusunan dokumen Renja PD.

- c) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyelegaraan rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang Infrastruktur. Kendala atau permasalahan yang dihadapi yaitu dalam melaksanakan koordinasi yang dilaksanakan secara hybrid dengan peserta terbatas.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas, Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa langkah, diantaranya:

- ✓ Dalam penjadwalan harus dikoordinasikan dengan SKPD melalui Mitra Kerja bidang Bappelitbang agar pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD tepat waktu.
- ✓ Untuk rapat - rapat koordinasi bisa dilakukan melalui hybrid.
- ✓ Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan tepat dan benar.
- ✓ Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan mengambil data langsung dan melalui media online dari SKPD terkait.
- ✓ Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian.

1.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

- a) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Ekonomi

Kegiatan ini melaksanakan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral; Membimbing secara teknis/fasilitasi/supervisi dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral. Sub kegiatan ini menghasilkan 4 laporan Monitoring dan Evaluasi Mitra Bidang Ekonomi. Kendala dalam pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD Mitra Bidang Ekonomi:

- Sebagian besar SKPD dalam pengisian format masih tidak terisi dengan benar.
- Untuk pengisian kolom realisasi kinerja program yang diambil dari perhitungan IKU secara manual, SKPD memerlukan waktu karena harus mengumpulkan data dari masing-masing Bidang.
- Pengisian laporan monev masih mengalami keterlambatan dikarenakan penginputan laporan masih manual.

- Penyusunan indikator output, outcome dalam format monev belum sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, untuk itu asistensi sangat diperlukan dalam upaya pendampingan OPD untuk mengecek kesesuaian indikator output.
- b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi

Asistensi penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik, namun kegiatan ini terkendala karena masih adanya beberapa SKPD yang terlambat memenuhi jadwal asistensi penyusunan Renja Perangkat Daerah dari jadwal yang sudah ditentukan.

- c) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

Penyelegaraan rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang dapat terlaksana dengan baik, walaupun rapat koordinasi dilaksanakan secara hybrid dengan peserta terbatas. Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas, Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa langkah, diantaranya:

- Dalam penjadwalan harus dikoordinasikan dengan SKPD melalui Mitra Kerja bidang Bappelitbang agar pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD tepat waktu.
 - Untuk rapat - rapat koordinasi bisa dilakukan hybrid dengan protokol kesehatan.
 - Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan benar.
 - Permintaan Data dari SKPD bisa dilakukan dengan mengambil data langsung dan melalui media online dari SKPD terkait.
 - Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian.
2. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Keberhasilan dari program ini adalah bahwa program ini telah melaksanakan dan memberikan **manfaat** bagi mitra kerjanya dalam hal sebagai berikut:



- Bimbingan secara teknis/fasilitasi/supervisi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, urusan (Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja serta Sekretariat Daerah);
- Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, urusan (Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja serta Sekretariat Daerah);
- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, urusan (Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja serta Sekretariat Daerah).

Dalam pelaksanaan program ini mengalami **Kendala atau hambatan** dalam Pelaksanaannya antara lain:

- Adanya refocusing anggaran sehingga capaian realisasi SKPD mitra Sosial dan Sumber Daya Manusia tidak maksimal.
- Adanya masa transisi endemik yang belum berakhir menyebabkan kegiatan berjalan lambat karena kegiatan yang bersifat koordinasi dengan SKPD terkait penyusunan perencanaan anggaran dan koordinasi realisasi capaian renja dilaksanakan secara hybrid.

Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, didukung oleh kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dimana sub kegiatan

pendukungnya adalah sebagai berikut:

2.1 Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Sosial

Kegiatan ini melaksanakan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD). Sub kegiatan ini menghasilkan 4 laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan Mitra Bidang Sosial. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD Mitra Bidang Sosial ini, terdapat **kendala** yaitu:

- Untuk pengisian kolom realisasi kinerja program yang diambil dari perhitungan IKU secara manual, SKPD memerlukan waktu agak lama karena harus mengumpulkan data dari masing-masing Bidang.
- Pengisian kolom target, kolom indikator kinerja dan formula/rumus masih banyak yang perlu dikoreksi
- Pengisian laporan monev masih mengalami keterlambatan dikarenakan penginputan laporan masih manual.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas verifikator Monev pada Sub Bidang Sosial
- Penyusunan indikator output, outcome dalam format monev belum sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, untuk itu asistensi sangat diperlukan dalam upaya pendampingan OPD untuk mengecek kesesuaian indikator output.

2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Mitra Kerja Bidang Sosial (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD).

Manfaat yang diberikan dari terlaksananya sub kegiatan ini adalah:

- Memberikan bimbingan secara teknis/fasilitasi/supervisi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan



Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RPJMD urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;

- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.

Kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yang masih masa transisi endemik yang belum berakhir menyebabkan kegiatan berjalan lambat karena kegiatan yang bersifat koordinasi dengan SKPD terkait penyusunan perencanaan anggaran dan koordinasi realisasi capaian renja dilaksanakan secara hybrid.

2.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial

Penyeleggaran rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang dapat terlaksana dengan baik, walaupun rapat koordinasi dilaksanakan secara hybrid dengan peserta terbatas. Dengan keterbatasan tersebut, agar pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tetap berjalan dengan baik, maka Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa langkah, diantaranya:

- Dalam penjadwalan harus dikoordinasikan dengan SKPD melalui Mitra Kerja bidang Bappelitbang agar pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD tepat waktu.
- Untuk rapat - rapat koordinasi pada saat endemik bisa dilakukan melalui hybrid dilakukan protokol kesehatan.
- Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan benar.
- Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan mengambil data langsung dan melalui media online dari SKPD terkait.
- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian.

2.4 Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Sumber Daya Manusia

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghasilkan 4 laporan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan mitra bidang SDM. Pelaksanaan Sub Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Terjalin sinegritas dan harmonisasi antar dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- Terlaksananya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

Dalam menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD mitra sub bidang SDm ini terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain:

- Untuk pengisian kolom realisasi kinerja program yang diambil dari perhitungan IKU masih dilakukan secara manual, sehingga SKPD memerlukan waktu agak lama karena harus mengumpulkan data dari masing-masing Bidang.
- Pengisian kolom target, kolom indikator kinerja dan formula/rumus masih banyak yang perlu dikoreksi.
- Pengisian laporan monev masih mengalami keterlambatan dikarenakan penginputan laporan masih manual.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas verifikator Monev pada Sub Bidang SDM.
- Penyusunan indikator output, outcome dalam format monev belum sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, untuk itu asistensi sangat diperlukan dalam upaya pendampingan OPD untuk mengecek kesesuaian indikator.

2.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDM

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Mitra Kerja Bidang SDM



(kebijakan teknis perencanaan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah).

2.6 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Manusia

Penyeleggaran rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang dapat terlaksana dengan baik. Agar pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tetap berjalan dengan lancar, maka Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa langkah, diantaranya:

- Dalam penjadwalan harus dikoordinasikan dengan SKPD melalui Mitra Kerja bidang Bappelitbang agar pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD tepat waktu.
- Untuk rapat - rapat koordinasi pada saat endemik bisa dilakukan secara hybrid dilakukan protokol kesehatan.
- Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan benar.
- Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan mengambil data langsung dan melalui media online dari SKPD terkait.
- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian

3. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini mendukung Sasaran Strategis pertama Bappelitbang yaitu “Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah”. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah:

3.1 *Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*

3.1.1 Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Pelaksanaan Forum SKPD yang dilaksanakan secara hybrid dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala antara lain kondisi jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara. Hal ini dapat diantisipasi dengan mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT TELKOM Kabupaten Tapin untuk masalah jaringan internetnya dan PT PLN Kabupaten Tapin untuk

kelancaran jaringan listrik pada saat berlangsungnya acara. Sehingga pada saat terjadi gangguan jaringan internet maupun listrik dapat segera teratasi.

3.1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan secara hybrid mengalami beberapa kendala diantaranya: jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara. Hal ini dapat diantisipasi dengan mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT TELKOM Kabupaten Tapin untuk masalah jaringan internetnya dan PT PLN Kabupaten Tapin untuk kelancaran jaringan listrik pada saat berlangsungnya acara. Sehingga pada saat terjadi gangguan jaringan internet maupun listrik dapat segera teratasi.

3.1.3 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan secara hybrid dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala antara jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara. Hal ini dapat diantisipasi dengan mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT TELKOM Kabupaten Tapin untuk masalah jaringan internetnya dan PT PLN Kabupaten Tapin untuk kelancaran jaringan listrik pada saat berlangsungnya acara. Sehingga pada saat terjadi gangguan jaringan internet maupun listrik dapat segera teratasi.

3.1.4 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan sub kegiatan ini yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan. Keterbatasan ini diakibatkan karena proses administrasi yang membutuhkan waktu cukup panjang. Koordinasi antara Bappelitbang dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin dan Pusat yang memerlukan waktu yang tidak sebentar, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan sub kegiatan ini.

3.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota

Dalam rangka pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah terealisasi pada Bappelitbang Kabupaten Tapin sepanjang tahun anggaran 2021 terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan secara online dan offline

dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala diantaranya: jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara.

- Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang masih terdapat kendala menyebabkan proses Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terganggu.

3.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 3.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan sub kegiatan tidak berjalan dengan lancar, ada kendala-kendala yang dihadapi. Yaitu keterbatasan personil perencanaan pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian.
- 3.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Dalam pelaksanaan koordinasi, rapat-rapat dan sosialisasi dengan SKPD mengalami kendala karena endemik Covid-19 bisa dilakukan melalui hybrid dengan protokol kesehatan yang ketat

3.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 3.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan secara hybrid dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala yaitu jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara.

- 3.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaannya masih ada kendala dalam melakukan pembinaan pengendalian perencanaan ini, antara lain:

- Ada beberapa SKPD yang melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan oleh Bappelitbang
- Untuk rapat-rapat koordinasi dengan SKPD terkendala karena endemik covid sehingga dilakukan secara hybrid.
- laporan yang diisi oleh SKPD belum terisi dengan benar sesuai format yang ditentukan.

Solusi yang ditawarkan untuk menghadapi kendala-kendala dalam

pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian yaitu:

- Dalam penjadwalan harus dikoordinasikan dengan SKPD melalui Mitra Kerja bidang Bappelitbang agar pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD tepat waktu.
- Untuk rapat - rapat koordinasi pada saat endemi ini bisa dilakukan secara hybrid dengan protokol kesehatan yang ketat.
- Melakukan sosialisasi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan benar.
- Proses kerjasama dengan BPS akan dilaksanakan pada awal tahun.
- Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan mengambil data langsung dari SKPD terkait.
- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian.

Manfaat dari Program Perencanaan dan Pengendalian ini adalah:

- Selarasnya sasaran strategis dengan tujuan dan misi Kepala Daerah;
- Program prioritas Kepala Daerah tahun 2021 terakomodir dalam RPJMD;
- Pencapaian Tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan pada tahun berkenaan sebesar 100 persen.

Kendala dalam Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah:

- Masih dalam masa endemik ini menyebabkan kegiatan berjalan agak lambat karena kegiatan yang bersifat koordinasi dengan SKPD terkait penyusunan perencanaan anggaran dan koordinasi realisasi capaian rencana kerja dan secara tatap muka tidak dapat semua dilaksanakan, adakalanya harus secara online.
- Adanya refocusing anggaran dalam rangka mengatasi inflasi daerah sehingga monitoring dan evaluasi capaian target dan realisasi kinerja SKPD tidak maksimal.

4. Program Penelitian dan Pengembangan

Penelitian menurut Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik



kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa Penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan Pelaksanaan Penelitian. Salah satu indikator dari kualitas penelitian adalah penelitian dapat menghasilkan naskah akademik. Naskah akademik ini mencakup beberapa jenis naskah atau dokumen. Dimulai dari policy brief, rekomendasi kebijakan, sampai pada model kebijakan strategis. Bisa memilih salah satu sebagai bentuk luaran dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Selain itu, hasil penelitian yang sekiranya bermanfaat diwajibkan untuk dipublikasi. Salah satu indikator untuk menentukan kualitas kinerja penelitian adalah dari hasil publikasi tersebut.

Program penelitian dan pengembangan merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian dan pengembangan berperan penting dalam mendorong pembagunan. Hasil kelitbangan yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai isu permasalahan yang ada, umumnya sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah (*policy*) terlebih dulu melakukan kegiatan penelitian.

Setiap awal tahun pelaksanaan anggaran para pimpinan perangkat daerah selaku pengguna anggaran melakukan perjanjian kinerja dengan bupati selaku kepala daerah, dimana perjanjian kinerja itu berupa sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah beserta targetnya yang sudah terlebih dahulu ditetapkan dalam dokumen perencanaan, target indikator utama tersebut harus diupayakan tercapai pada akhir tahun pelaksanaan anggaran, berdasarkan perjanjian kinerja perangkat daerah tersebut, terkait dengan bidang penelitian dan pengembangan, kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin mempunyai 1 (satu) sasaran strategis (kinerja utama) yakni Meningkatkan hasil kelitbangan dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dan Persentase hasil kelitbangan yang disitasi dengan masing-masing capaian kinerja 100%.

Sebagaimana eselon II yang telah melakukan perjanjian kinerja Tahun 2022 dengan kepala daerah, maka itu juga diberlakukan untuk eselon III di Bappelitbang Kabupaten. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Tapin telah melakukan perjanjian kinerja dengan Kepala Bappelitbang Kabupaten

Tapin dan ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja beserta target capaiannya, dengan sasaran strategis atau kinerja utama bidang penelitian dan pengembangan adalah meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan indikator kinerja yakni persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindak lanjuti. Indikator ini dapat dicapai dengan mengetahui jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang dihasilkan. Tahun 2022 bidang Litbang menghasilkan 134 rekomendasi hasil kelitbangan, dengan jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebanyak 134, sehingga realisasi target Indikator kinerja Bidang Litbang tercapai sebesar 100%. Rekomendasi hasil kelitbangan yang dihasilkan ini melibatkan 31 Perangkat Daerah

Sampai dengan tahun 2022 Bidang Litbang menghasilkan 149 rekomendasi kebijakan melalui berbagai macam hasil penelitian ilmiah melalui menu Pemanfaatan Hasil Penelitian. Penelitian ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2022 berjumlah 23 Penelitian yang dapat diakses secara luas bagi stakeholder melalui menu Repository www.e-starlitbang.tapinkab.go.id.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Kendala yang dihadapi bidang penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan kelitbangannya selama tahun 2022 adalah:

- a. Keterbatasan waktu penelitian yang cukup singkat maksimal hanya 4 bulan.
- b. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan uji coba replikasi inovasi.

Terkait dengan fungsi JF Peneliti dalam kelitbangan salah satunya penelitian dan pengembangan dalam mendukung pencapaian angka kredit, selama kurun waktu tahun 2022 JF Peneliti telah memenuhi beberapa point HKM yang terdiri atas:

1. Publikasi Jurnal naskah dengan judul: "Analisis K-Means Cluster untuk Identifikasi Kawasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan" per tanggal 24 Juni 2022, sudah selesai tahap penelaahan dan dinyatakan layak publikasi untuk edisi Vol. 7, No. 1, Februari 2023 an Riry Magriaty, SE, M.Si pada Journal of Regional and Rural Development Planning terakreditasi Sinta 3 melalui (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) Republic of Indonesia number B/4130/E5/E5.2.1/2019, *Journal of Regional and Rural Development*

Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)

2. Peningkatan Kompetensi Jafung Konsentrasi Ilmu Perencanaan Wilayah melalui ujian Kompetensi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai Analis Sistem Informasi Geografis Nomor SURAT KETERANGAN 22.1/LSPGEOESPASIAL/SKet/ADM/XII/2022 pada tanggal 29 Oktober 2022 telah dilakukan Asesmen untuk skema Okupasi Analis Sistem Informasi Geografis: Nama: Riry Magriaty, SE, M. Si dari BNSP.
3. Co-Research melalui penelitian dengan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Pemetaan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa ekosistem Penyediaan Pangan dan Air di Kabupaten Tapin Nomor 234/UN8.1.23/KS/2022 tanggal 22 Februari 2022 oleh Dr.Ir. H. Bambang Joko Priatmadi, MP selaku Dekan Fakultas Pertanian.
4. Co-Research melalui penelitian dengan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat dengan judul Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Tapin dengan Nomor 1556/UN.8.1.23/KS/2022 tanggal 30 Agustus 2022 oleh Dr.Ir. H. Bambang Joko Priatmadi, MP selaku Dekan Fakultas Pertanian.

Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan yang dilakukan didukung oleh beberapa kegiatan dan sub kegiatan, antara lain:

4.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi ini didukung oleh 2 sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp310.905.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp245.202.000,- atau 78,87% dari anggaran.

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	121.235.000	79.950.000
2.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	189.670.000	165.950.000
	Total	310.905.000	245.202.000

4.1.1 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Nota Kesepahaman pengadaan melalui swakelola antara Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin dengan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Nomor 050/60Litbang/Bappelitbang/2022-Nomor 29/UN8.1.23/KS/2022

dengan nilai kontrak sebesar Rp.96.000.000,-. Adapun penelitian yang dihasilkan adalah berupa konsep spasial Pemetaan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa ekosistem Penyediaan Pangan dan Air di Kabupaten Tapin. Kegiatan ini menghasilkan 1 penelitian yang dapat didownload secara gratis pada website www.e-starlitbang.tapinkab.go.id dengan tampilan hasil penelitian sebagai berikut:



1.1.1 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Perorangan yang terdiri atas Belanja Jasa Tenaga Ahli Agribisnis Kajian Pengembangan Food Estate Kabupaten Tapin dengan nilai kontrak Rp. 31.775.000,00 dan Belanja Jasa Tenaga Ahli Ilmu Ekonomi Pertanian Kajian Pengembangan Food Estate Kabupaten Tapin dengan nilai kontrak Rp. 31.775.000,00. Kegiatan ini menghasilkan 1 penelitian yang berjudul Kajian Pengembangan Food Estate Kabupaten Tapin yang dapat didownload secara gratis pada website www.e-starlitbang.tapinkab.go.id dengan tampilan hasil penelitian sebagai berikut:



4.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja, dengan total pagu sebesar Rp166.385.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp134.085.200,- Atau 80.59% dari anggaran.

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	166.385.000	134.085.200
	Jumlah	166.385.000	134.085.200

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen ROAD MAP SIDA Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024, Road Map SIDA Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024 ini mengambil tema meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin, kegiatan ini dilaksanakan melalui Nota Kesepahaman pengadaan melalui swakelola antara Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor 050/337-Litbang/Bappelitbang/2022 dan Nomor :800/486-set 3/Balitbangda, dengan nilai kontrak sebesar Rp.48.000.000,- . Dokumen Road Map SIDA Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024 ini dapat didownload secara gratis pada website www.e-starlitbang.tapinkab.go.id.

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini selama tahun 2022 kendala yang dihadapi dari adalah:

- Keterbatasan waktu penelitian yang cukup singkat maksimal hanya 4 bulan.
- Hasil penelitian memiliki ruang lingkup yang terbatas sehingga rekomendasi yang dihasilkan juga terbatas pada tema tertentu.
- Jumlah sampling penelitian untuk data primer terbatas sedangkan wilayah penelitian cukup luas.
- Lamanya proses review untuk naskah publikasi penelitian.

4.3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, dengan total pagu sebesar Rp816.539.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp638.373.700,- atau 78,18% dari alokasi anggaran yang

ada. Rincian sub kegiatan pendukung kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi ini adalah:

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	686.559.000	557.438.700
2.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	129.980.000	80.935.000
	Jumlah	816.539.000	638.373.700

4.3.1 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Pada kegiatan ini jumlah penelitian yang dihasilkan ada 2 tema. Kegiatan pertama adalah melalui Pengadaan Langsung kepada PT. DIGITAMA SINERGI INDONESIA untuk kegiatan Penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin dengan nilai kontrak Rp. 94.205.700,00 dan Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin dengan nilai kontrak Rp. 94.182.000,00. Kedua kegiatan ini menghasilkan 3 buku penelitian dan dapat didownload secara gratis pada website www.estarlitbang.tapinkab.go.id dengan tampilan hasil penelitian sebagai berikut:



Kegiatan kedua adalah tindak lanjut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola Antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tapin Dan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Nomor: 050/50-Litbang/Bappelitbang/2022-Nomor: 232/PL40/TU/2022 melalui Kegiatan Penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Tapin dengan



nilai kontrak Rp. 160.000.000,- . Kedua kegiatan ini menghasilkan 4 buku penelitian dan dapat didownload secara gratis pada website www.e-starlitbang.tapinkab.go.id dengan tampilan hasil penelitian sebagai berikut:

Uji coba hasil replikasi inovasi yang dtelah dilaksanakan di desa sei Bahalang dan desa Souto Baru. Kendala yang dihadapi dari pelaksanaan ini selama tahun 2022 adalah Keterbatasan anggaran dalam uji coba inovasi.

4.3.2 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil kelitbangan dilaksanakan melalui penyusunan dokumen ROAD MAP SIDA Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024. Road Map SIDA Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024 ini mengambil tema "***Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah Dan Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Tapin***", kegiatan ini dilaksanakan melalui Nota Kesepahaman pengadaan melalui swakelola antara Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor 050/337-Litbang/Bappelitbang/2022 dan Nomor:800/486-set 3/Balitbangda, dengan nilai kontrak sebesar Rp.48.000.000,-. Dokumen Road Map SIDA Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024 ini dapat didownload secara gratis pada website www.e-starlitbang.tapinkab.go.id.



TABEL 3.8 ANALISIS KINERJA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

SKPD: BAPPELITBANG
TAHUN 2022

KEPALA					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Score 8,1	Score 6,56	80%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	90%	124.27%	138.07%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	90%	93.59%	103.98%
2	Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan	90%	100%	111.11%
		Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	90%	100%	111.11%
SEKRETARIS					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	100%	100%	100%
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90%	90%	100%
2	SDM yang berkualitas	Persentase ASN dengan capaian kinerja $\geq 90\%$	90%	90%	100%
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN SDM					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra sub bidang Sosial dan SDM	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya capaian kinerja program SKPD mitra Sosial dan SDM	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM	90%	90%	100%
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%



	waktu dan sesuai standar				
2	Meningkatnya kualitas capaian kinerja program prioritas daerah	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	90%	90%	100%

BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya capaian kinerja program SKPD mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	80%	80%	100%

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappelitbang	Score 4.3	Score 4.3	100%
2	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%



3	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN	100%	100%	100%
---	--	--	------	------	------

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%	100%	100%
		Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%	100%	100%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100%	100%	100%

SUB BAGIAN KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%
		persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas hasil kajian	Persentase hasil kajian kelitbang Sosial Budaya yang berkualitas	100%	100%	100%



	kelitbangan sosial budaya				
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan Ekonomi	Persentase hasil kajian kelitbangan ekonomi yang berkualitas	100%	100%	100%
SUB BIDANG SOSIAL					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub bidang sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang sosial selesai tepat waktu	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang social	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang sosial yang ditindaklanjuti	90%	90%	100%
SUB BIDANG SDM					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub bidang sdm yang	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang sdm selesai tepat waktu	100%	100%	100%



	disusun tepat waktu dan sesuai standar				
2	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang sdm	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang sdm yang ditindaklanjuti	90%	90%	100%

SUB BIDANG EKONOMI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Ekonomi selesai tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	90%	90%	100%

SUB BIDANG INFRASTRUKTUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
-----------	--------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------	----------------



1	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Ekonomi selesai tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	90%	90%	100%

SUB BIDANG PENGENDALIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas kinerja Program Prioritas Daerah	Peningkatan capaian kinerja Program Prioritas Daerah yang tercapai	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%	100%	100%

SUB BIDANG PERENCANAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Musyawarah Perencanaan	Persentase hasil berita acara Musrenbang di semua level tingkatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%	80%	100%



	Pembangunan Daerah yang berkualitas				
2	Terwujudnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	100%	100%	100%



3.1.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, didukung oleh:

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, indikator Indeks Kualitas Perencanaan capaian 100% melalui 1 kegiatan pendukungnya seperti dalam tabel diatas. Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dilakukan pada saat Pandemi Covid-19 melalui daring dan tidak secara tatap muka seperti tahun sebelumnya. Meskipun dilaksanakan secara daring, hal ini tidak menjadi penghambat dari rencana dan jadwal penyusunan dokumen RKPD. Sehingga dokumen RKPD yang disusun tetap sesuai dengan standar dan kaidah penyusunan yang berlaku, juga dapat diselesaikan tepat waktu untuk selanjutnya ditetapkan melalui penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan RKPD Kabupaten Tapin.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan dengan nilai capaian masing-masing indikator sebesar 100%. Adapun keberhasilan pencapaian dari program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan pendukungnya seperti dalam tabel diatas. Keberhasilan dari program diatas merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin tingkat keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan pada tahun berkenaan. Dengan demikian, maka



RKPD yang terdiri dari renja-renja perangkat daerah juga akan selaras dan konsisten dengan RPJMD pada tahun berkenaan. Jadi, program dan kegiatan yang disusun oleh Perangkat Daerah terjaga konsistensi dan keselarasannya, baik dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang bersangkutan maupun dengan RPJMD Kabupaten Tapin pada Tahun yang berkenaan.

3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, indikator rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah dengan nilai capaian indikator sebesar 93,64%. Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan diatas pada saat pandemi Covid-19 ini dilakukan baik melalui daring maupun tatap muka dengan mengutamakan protokol kesehatan, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan monitoring evaluasi, Informasi hasil Monitoring dan evaluasi dapat memberikan umpan balik kepada pelaksana program tentang hasil capaian program, dalam arti sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD dengan nilai capaian indikator sebesar 116.68%. Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan diatas pada saat pandemi Covid-19 ini dilakukan baik melalui daring maupun tatap muka dengan mengutamakan protokol kesehatan, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan monitoring evaluasi, Informasi hasil Monitoring dan evaluasi dapat memberikan umpan balik kepada pelaksana program tentang hasil capaian program, dalam arti sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Kelitbangan dengan indicator kinerja Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dan Persentase hasil kelitbangan yang disitasi dengan capaian masing-masing 100%, didukung oleh:



- a. Pogram penelitian dan Pengembangan dengan indikator Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan tingkat capaian sebesar 100 % ditunjang dengan 3 kegiatan yaitu :
 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan topik:
 - a. penelitian pengembangan Kajian Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Serapan Emisi Karbon Dioksida di Kab. Tapin dengan saran dan rekomendasi yang dihasilkan pada penelitian tersebut adalah penambahan atau pergantian vegetasi yang ada dengan jenis vegetasi yang mempunyai daya serap tinggi, misalnya pohon buni (*Antidesma bunius*), kenitu (*Chrysophyllum cainito*), tanjung (*Mimusops elengi*), dan trambesi (*Samanea saman*). Penggunaan tanaman lokal seperti meranti rawa (*Shorea balangeran*), galam (*Melaluca leucadendron*), jelutung rawa (*Dyera lowii*) pada daerah-daerah yang tergenang dan tanggaring/maritam (*Nephelium mutabile*) pada lahan lembab sangat dianjurkan untuk meningkatkan peluang pertumbuhan tanaman.
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan topik penelitian pengembangan Kajian Strategi Pengembangan Komoditas Cabai Rawit Hiyung di Kab. Tapin. Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu Perlu dilakukan branding produk pihak UMKM pengolahan hasil cabai hiyung dengan binaan oleh Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, variasi produk perlu dibuat oleh pihak UMKM pengolahan hasil cabai hiyung dengan binaan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, kemitraan yang lebih luas perlu dilakukan oleh pihak UMKM pengolahan hasil cabai hiyung dengan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, perlu penerapan teknologi pengolahan hasil yang mengacu kepada "*Good Manufacturing Practices (GMP)*" dibawah binaan/fasilitasi Dinas Perindustrian



Kabupaten Tapin, penguatan modal dan peningkatan skill SDM perlu dilakukan dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dan perlu upaya memperoleh HAKI atas Cabai Rawit Hiyung yang tidak hanya sekedar indikasi geografis dengan fasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin serta dalam rangka meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan cabai rawit hiyung segar dan hasil olahannya, maka perlu dilakukan perluasan areal tanam dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

- c. Kajian Pengembangan Limbah Biomassa Pertanian Sebagai Bioenergi dan *Sustainable Agriculture* di Kab. Tapin dengan Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
- Dinas Lingkungan Hidup: memanfaatkan limbah jerami padi, sekam padi dan kotoran sapi dapat dijadikan sebagai program inovasi untuk pengendalian pencemaran tanah dan air pada khususnya dan pencemaran lingkungan pada umumnya.
 - Dinas Pertanian: kajian lebih lanjut terkait volume gas dari berbagai macam jenis biomassa limbah pertanian dan peternakan terutama jenis bahan yang memerlukan tahap perlakuan awal (fermentasi) dan kajian pemanfaatan limbah padat sisa proses pembuatan biogas menjadi pupuk cair/organik dengan tingkat efektivitas dan efisiensi unsur hara tanah terhadap struktur dan tekstur tanah dengan konsep sustainable agriculture.
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa: membuat program inovasi desa dalam pengembangan bioenergi sebagai pengganti gas elpiji dengan memanfaatkan limbah pertanian dan peternakan sesuai potensi daerah masing-masing desa di Kabupaten Tapin.
 - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah: membuat program penanggulangan bencana terutama terkait kebakaran



lahan untuk tidak membakar limbah pertanian seperti jerami padi, sekam padi dan limbah pertanian lainnya lebih baik dimanfaatkan sebagai biomassa dalam pengembangan bioenergi menjadi biogas.

- Kepala BPP Kecamatan Tapin Tengah: Mengembangkan potensi dan hasil identifikasi sumber biomassa dalam pengelolaan limbah pertanian yang ada di Kecamatan Tapin Tengah seperti jerami padi, sekam padi, batang, daun, dan tandan kosong kelapa sawit dan limbah pertanian lainnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber bioenergi berupa biogas atau bioetanol dengan proses fermentasi.
 - Kepala Desa Sungai Bahalang: memasukkan umpan/input biomassa setiap hari ke dalam digester biogas agar tekanan gas metan selalu tersedia dan dapat digunakan secara terus menerus dan biomassa yang dijadikan umpan/input sebaiknya dilakukan pengecilan ukuran terlebih dahulu agar tidak terjadi penyumbatan pada alat sehingga proses pembentukan gas metan dapat berjalan secara optimal.
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan Kajian Faktor Pemicu Pernikahan Dini dan Kebijakan Penanggulangannya di Kabupaten Tapin Tahun 2021. Hasil kajian ini dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Adapun hasil rekomendasi yang dihasilkan adalah Pendewasaan anak melalui Pendidikan wajib 12 tahun harus terus diperjuangkan melalui Lembaga-lembaga Pendidikan baik negeri maupun swasta melalui Dinas Pendidikan Memberikan pemahaman akan pola pikir masyarakat tentang dampak pernikahan usia anak terutama dampak akibat pergaulan bebas melalui Dinas Kesehatan. Rekomendasi kepada CSR/ perusahaan dalam



pemberian beasiswa pendidikan pada anak-anak hingga mencapai pendidikan tinggi (khususnya anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah), pengadaan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan anak untuk mengembangkan life skill melalui Dinas Pendidikan.

3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Pengembangan inovasi dan teknologi didukung oleh 3 (tiga) sub-kegiatan:

- Penelitian, Pengembangan, Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi. Pengembangan inovasi dalam bentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui website E-STAR atau electronic sustainable tapin research yang berfungsi sebagai open access repository hasil penelitian litbang, bank data, dan database inovasi daerah bagi kabupaten tapin. Melalui Inovasi ini diharapkan akan mempermudah tata Kelola pemerintahan bagi stakeholder.
- Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi. Penerapan Teknologi menghasilkan output inovasi daerah kabupaten tapin sebanyak 7 inovasi dari 6 inovator yang berhasil masuk kedalam cluster pemerintah kabupaten yang inovatif dari Kementerian Dalam Negeri.
- Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil kelitbangan dengan mengangkat tema Penguatan fungsi litbang dalam Implementasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin berbasis penelitian Ilmiah.

Dari keseluruhan saran rekomendasi tersebut telah dilakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang makan memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil kajian penelitian yang telah dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun



2021 sehingga dapat menghasilkan sebuah program yang mana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

4.2. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2022 Bappelitbang Kabupaten Tapin melaksanakan 4 program dengan 46 kegiatan dengan alokasi anggaran Bappelitbang Tahun 2022 sebesar **Rp12.833.194.045,00** dan terserap sebesar **Rp9.762.449.258,00 (76.07%)**. Berdasarkan komposisi belanjanya, penyerapan anggaran untuk belanja operasional dan belanja modal. Adapun untuk belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp4.026.685.376,- dan belanja barang & jasa sebesar Rp5.321.583.882,-. Sedangkan untuk penyerapan anggaran untuk belanja modal yang digunakan untuk membiayai kebutuhan penyediaan barang milik daerah atau aset yang dikelola oleh Bappelitbang yaitu sebesar Rp414.180.000,-. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu adanya beberapa kegiatan yang terkendala oleh keterbatasan anggaran daerah. Namun hal tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap realisasi kinerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin berkat efisiensi penggunaan anggaran.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin dapat dikategorikan Baik, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini dibuktikan bahwa realisasi 4 (empat) dari total 5 (lima) indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan. Realisasi anggaran tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL 3.9 REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2022

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.689.070.058	8.611.710.645	99,10
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.700.000	37.267.200	76.51
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.148.800	32.050.000	84.71
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.650.000	10.118.4000	69.07
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.938.811.729	4.040.75.676	81.82
	3. Penyedia Gaji Tunjangan ASN	4.907.407.829	4.019.165.376	81.90
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Akhir Tahun SKPD	24.603.900	18.750.300	75.59
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.600.000	2.840.000	43.03
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.525.763.600	1.666.164.824	86.76
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.389.600	1.054.000	5.73
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	455.887.900	246.360.400	54.04
	8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.618.500	102.785.800	63.60
	9. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	29.218.400	20.289.100	89.44
	10. Penyediaan Bahan/Material	27.626.200	17.912.400	64.84



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.	11. Fasilitas Kunjungan Tamu	18.750.000	18.750.000	100
	12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.814.273.000	1.279.013.124	70.50
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	320.073.300	262.220.000	81.95
	13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320.073.300	262.220.000	81.95
5.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	594.793.616	483.959.123	81.36
	14. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	487.612.500	401.693.123	82.38
	15. Penyedia Jasa Peraatan dan Perlengkapan Kantor	14.207.116	13.710.000	96.50
	16. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.974.000	88.550.000	73.73
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.569.400	70.709.235	38.10
	17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.596.200	58.835.485	46.22
	18. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	40.973.200	11.873.750	28.98
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.788.892.900	1.326.862.900	74,17
7.	Peyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.175.412.600	883.817.500	75.19



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	19. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	37.213.600	37.213.600	100.00
	20. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	139.526.000	135.337.000	97.00
	21. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	17.246.000	0	0.00
	22. Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan	255.578.800	224.828.800	99.67
	23. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	755.846.200	486.817.500	64.36
8.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	416.480.300	280.466.600	40.83
	24. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	214.500.000	197.994.600	92.31
	25. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	201980.300	280.466.600	67.34
9.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	196.990.000	162.578.800	82.53
	26. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	104.480.000	76.186.000	72.92
	27. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	92.510.000	86.392.800	93.39
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.138.771.500	828.856.400	72.79
10.	Kordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	422.864.800	271.081.100	64.11
	28. Koordnasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.350.000	56.449.800	72.93



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	29. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	69.850.000	44.610.000	76.80
	30. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.700.000	33.562.500	76.80
	31. Koordnasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	103.564.800	59.633.700	57.56
	32. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	79.820.000	43.935.000	55.04
	33. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48.550.000	32.890.100	67.74
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	311.991.700	216.005.300	69.23
	34. Koordnasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.562.300	46.750.000	78.49
	35. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.182.500	35.287.800	46.94
	36. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41.635.000	29.784.000	71.54
	37. Koordnasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.611.900	104.193.700	76.82
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.138.771.500	828.856.400	72.79
	38. Koordnasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.415.000	57.725.000	74.57
	39. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	61.950.000	48.219.000	77.84
	40. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.450.000	33.494.000	70.59



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
41.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	217.100.000	202.331.000	93.20
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.293.829.000	1.027.660.900	79.42
13.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	166.385.000	134.085.200	80.59
42.	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	166.385.000	134.085.200	80.59
14.	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	310.905.000	245.202.000	78.87
43.	Peneitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	121.235.000	79.252.000	65.37
44.	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	189.670.000	165.950.000	87.49
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	816.539.000	648.373.700	79.40
45.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	686.559.000	567.438.700	81.19
46.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	129.980.000	80.935.000	62.27
	JUMLAH	12.833.194.045	9.762.449.258	76.07



Tahun 2022 Bappelitbang Kabupaten Tapin melaksanakan 4 program dengan 46 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp12.833.194.045,00** Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp9.762.449.258,00** atau **76,07%**.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin dapat dikategorikan Sangat Baik, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini dibuktikan bahwa realisasi dari 4 Indikator Kinerja Utama mencapai lebih dari 100%. Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2022

Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Jumlah Pagu Keseluruhan	12.833.194.045,00	9.762.449.258,00	3.070.744.787,00	76.07

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2021 dari Inspektorat Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2022. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pada tahun 2022, Bappelitbang Kabupaten Tapin menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Perubahan IKU Rencana Strategis 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbang Tahun 2022.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase **capaian kinerja >100%** atau **Baik Sekali** sebanyak **4 IKU**.



2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase **capaian kinerja 80%** atau dengan kategori capaian **Baik (B)** sebanyak 1 IKU.
3. **Rata-rata Capaian Indikator Kinerja** Utama tahun 2021 Bappelitbang Kabupaten Tapin adalah sebesar **108,86%**.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Bappelitbang Kabupaten Tapin akan terus mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

KEPALA BAPPELITBANG



[Handwritten Signature]
Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Perbina Utama Muda



LAMPIRAN 1. LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS SAKIP BAPPELITBANG
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INSPEKTORAT Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31762 Fax (0517) 31762 RANTAU</p>	
Nomor	: 700/Reg/089/AKIP/Wil.III/VIII/INSP/2022	25 Agustus 2022
Hal	: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021	
Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di Rantau		
<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (<i>outcome</i>) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (<i>result oriented government</i>) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan memperoleh nilai 76,50 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:</p>		
<hr/> <p>Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p style="text-align: right;">1 </p>		



Komponen yang Dinilai	Bobot 2020	Nilai 2020	Bobot 2021	Nilai 2021
a. Perencanaan Kinerja	30	29,50	30	24,60
b. Pengukuran Kinerja	25	21,88	30	23,10
c. Pelaporan Kinerja	15	12,94	15	10,50
d. Evaluasi Internal	10	8,21	25	18,25
e. Capaian Kinerja	20	12,91		
Nilai Hasil Evaluasi	100	85,43	100	76,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A		BB

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya sehingga mengalami kemajuan yang cukup berarti, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, namun masih belum menggambarkan penetapan target yang dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis;
2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, namun masih belum menggambarkan keterlibatan setiap pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja;
3. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan karena belum terdapat bukti nyata Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
4. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) sehingga belum optimal dalam memicu perbaikan kinerja;
5. Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan kinerja, namun belum direviu secara internal;
6. Dokumen Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
7. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja;
8. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih berupa evaluasi program dan evaluasi rencana aksi;
9. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar karena belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;



10. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan pendalaman yang memadai;
11. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);
12. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam implementasi SAKIP.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami rekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dengan membuat analisis pendekatan penetapan target;
2. Melibatkan setiap pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja, minimal terdapat absensi dan notulen rapat perencanaan kinerja;
3. Melibatkan Pimpinan sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, minimal terdapat absensi dan notulen rapat pengukuran kinerja;
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja;
5. Melaksanakan reviu internal terhadap dokumen laporan kinerja;
6. Menyajikan analisis dan evaluasi capaian dibanding dgn target nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*) dalam laporan kinerja;
7. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai pengaruh terhadap budaya kinerja organisasi;
8. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara menyeluruh, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja;
9. Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal, minimal sop evaluasi kinerja internal;
10. Mendokumentasikan kertas kerja evaluasi sebagai bukti nyata dari kedalaman evaluasi;
11. Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja;
12. Mendokumentasikan bukti tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai langkah nyata dalam implementasi SAKIP.



Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Inspektur

Unda Absori, SH.MH
Pembina Tk.I
NIP.19700722 200501 1 013



**LAMPIRAN 2. SURAT KEPUTUSAN TIM SAKIP BAPPELITBANG KABUPATEN
TAPIN TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT Haryono No.4 Telp. (0517) 31508 Rantau

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NOMOR : 970/48/BAPPELITBANG/2022

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik



- Indonesia 965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;
- KETIGA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan penyesuaian kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
 2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Badan dengan Rencana Strategis Daerah;
 3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Badan dengan Indikator Kinerja Daerah;
 4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
 5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
 6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
 7. Menyusun laporan kinerja;
 8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
 9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi.
 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Bappelitbang Kabupaten Tapin;
 11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian



Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;

12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 7 Februari 2022

**Kepala Bappelitbang
Kabupaten Tapin,**

Drs. H. ZAINAL AOLI, ST, MT
NIP. 19690214 199403 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tapin;
2. Wakil Bupati Tapin;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
4. Inspektur Kabupaten Tapin;
5. Yang bersangkutan



Lampiran : Keputusan Kepala Bappelitbang
Nomor : 970/48/BAPPELITBANG/2022
Tanggal : 7 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	Pengarah Reformasi Birokrasi Bappelitbang	Kepala Bappelitbang
2.	Penanggung Jawab SAKIP	Sekretaris Bappelitbang
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian
5.	Anggota	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
6.	Anggota	Kepala Bidang Sosial dan SDM
7.	Anggota	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
8.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
10.	Anggota	JF Perencana
11.	Anggota	JF Analis Kebijakan
12.	Anggota	JF Analis Kebijakan
13.	Anggota	JF Analis Kebijakan
14.	Anggota	JF Analis Kebijakan
15.	Anggota	JF Analis Kebijakan
16.	Anggota	JF Peneliti
17.	Anggota	JF Peneliti
18.	Anggota	Analisis perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

**Kepala Bappelitbang
Kabupaten Tapin,**



Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT
NIP. 19690214 199403 1 011



**LAMPIRAN 3. SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPELITBANG
KABUPATEN TAPIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

R A N T A U Kode Pos : 71114

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 970/71/BAPPELITBANG/2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan



Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
11. (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25) (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian



dan Pengembangan Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 22 Oktober 2021

KEPALA BAPPELITBANG KAB.TAPIN



Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT

NIP. 19690214 199403 1 011

Tembusan :

Inspektur Kab. Tapin



Lampiran : Keputusan Kepala Bappelitbang
Nomor : 970 / 71 / BAPPELITBANG / 2021
Tanggal : 22 Oktober 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORM PERHITUNGAN	PENJELASAN
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Total score rata-rata dari (nilai proses perencanaan + nilai isian perencanaan + nilai jaminan tindak lanjut) / total score ideal x 10	Skala Kategori 1.0 ~ 2.0 Sangat kurang 2.1 ~ 4.0 Kurang 4.1 ~ 6.0 Cukup 6.1 ~ 8.0 Baik 8.1 ~ 10 Sangat baik
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	Yang dimaksud rata-rata capaian kinerja dengan perhitungan rumus: $\frac{\sum \text{Capaian kinerja setiap indikator kinerja utama setiap periode (n)}}{\sum \text{jumlah periode sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	AA >90-100 (Sangat Memuaskan) A >80-90 (Memuaskan) BB >70-80 (Sangat Baik) B >60-70 (Baik) CC >50-60 (Cukup/Memadai) C >30-50 (Kurang) D <30 (Sangat Kurang)
			$\frac{\sum \text{jumlah rata-rata capaian indikator kinerja utama}}{\sum \text{jumlah indikator kinerja utama}} \times 100\%$	WTP=100% WDP=75% TW=50 TMP=25%



		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	Yang dimaksud rata-rata capaian kinerja dengan perhitungan rumus: $\frac{\sum \text{Capaian kinerja setiap indikator kinerja utama SKPD setiap periode (n)}}{\sum \text{jumlah periode sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	
			$\frac{\sum \text{jumlah rata-rata capaian indikator kinerja utama SKPD}}{\sum \text{jumlah indikator kinerja utama}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	$\frac{\sum \text{hasil kajian kelitbangan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{hasil kelitbangan}} \times 100\%$	
		Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	Rata-rata capaian hasil disitasi kajian kelitbangan	Yang dimaksud dengan capaian hasil disitasi adalah realisasi disitasi kajian dibagi target disitasi dikali 100%

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 22 Oktober 2021

KAPALA BAPPELITBANG KAB. TAPIN



Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT
NIP. 19690214 199403 1 011



LAMPIRAN 4. PERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Dr. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Score 8,1 (sangat baik)
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	90%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	90%
3	Meningkatnya hasil kolaborasi	Persentase hasil kolaborasi dimanfaatkan	90%
		Persentase hasil kolaborasi yang disitasi	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.467.523.999,00	Sumber Dana APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp2.265.491.700,00	Sumber Dana APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp1.225.381.500,00	Sumber Dana APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp1.196.315.000,00	Sumber Dana APBD

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	80%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	90%
2.	SDM yang berkualitas	Persentase ASN dengan capaian kinerja \geq 90%	90%

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp56.500.000,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.938.811.683,00
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.056.774.200,00
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp361.870.100,00
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp713.201.116,00
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp288.986.900,00

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqil, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19690214 199403 1 011

Sekretaris,

H. Meidy Wasis Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP.19840522 200803 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbang yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil kelitbang yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp172.835.000,00
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp451.520.000,00
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp561.960.000,00

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqil, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

H. Hairani Fauzi, S.IP
Pembina
NIP. 19640504 198907 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan Dan Pengendalian
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
2.	Meningkatnya kualitas capaian kinerja program prioritas daerah	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	80%

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp1.336.991.700,00
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp651.410.000,00
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp277.090.000,00

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian,

Zulfien Radmi, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19780804 200804 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	90%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan (SDA) Sumber Daya Alam	Rp328.891.700,00
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp428.400.000,00

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur,

H. Pajar Safari, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710823 199303 1 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah mitra bidang Sosial dan SDM	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang sosial dan SDM	90%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.488.089.800,00

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Rantau, 17 Januari 2022

Pit, Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia,

Muhamad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200803 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%
		Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.27.300.000,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.29.200.000,00

Sekretaris,

H. Meidy Harris Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP.19840522 200803 1 001

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan,

Mahdiati, SP, M.Ling
Penata Tk I
NIP. 19790507 200501 2 015



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Administrasi Keuangan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
		persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Rp4.907.407.783,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp24.803.900,00
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp6.800.000,00

Sekretaris

H. Meidy Hams Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP.19840522 200803 1 001

Rantau, 17 Januari 2022
Kepala Sub Bagian Keuangan,

Agustin Carolina, SE, MM
Penata Tk.I
NIP. 19840801 201001 2 023

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappelitbang	score 4,3
2.	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
3.	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.18.380.500,00
2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.763.322.200,00
3. Penyediaan bahan logistik kantor	Rp.161.618.500,00
4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp.15.325.000,00
5. Penyediaan bahan/material	Rp.17.079.000,00
6. Fasilitasi kunjungan tamu	Rp.13.750.000,00
7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp.1.067.299.000,00
8. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.361.870.100,00
9. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp.587.620.000,00
10. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.30.107.116,00
11. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp.95.474.000,00
12. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp.220.193.700,00
13. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.66.773.200,00

Sekretaris

H. Meidy Hams Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP.19840522 200803 1 001

Rantau, 17 Januari 2022
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Siti Nur Azizah, S.Kom
Penata
NIP. 19850112 200904 2 004



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Sub Bidang Pengendalian
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas kinerja Program Prioritas Daerah	Peningkatan capaian kinerja Program Prioritas Daerah yang tercapai	100%
2.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi Indikator Kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|------------------|
| 1. Koordinasi pengendalian perencananan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota | Rp141.080.000,00 |
| 2. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan bidang pelaksanaan pembangunan daerah | Rp136.010.000,00 |
| 3. Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan daerah | Rp194.500.000,00 |
| 4. Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan pembangunan SKPD | Rp356.910.000,00 |

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian,


Zulfan Radmi, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19780804 200804 1 004

JF. Perencana,


Muhamad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200803 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Sub Bidang Perencanaan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase hasil berita acara Musrenbang di semua level tingkatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%
2.	Terwujudnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	100%

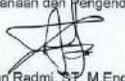
Sub Kegiatan

Anggaran

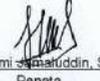
- | | |
|--|------------------|
| 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Rp135.846.700,00 |
| 2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Rp62.750.000,00 |
| 3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Rp173.150.000,00 |
| 4. Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan | Rp250.505.000,00 |
| 5. Koordinasi Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota | Rp714.740.000,00 |

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian,


Zulfan Radmi, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19780804 200804 1 004

JF. Perencana,


M. Hilmi, SE
Penata
NIP. 19920129 201503 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Sub Bidang Ekonomi
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp78.674.800,00
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp72.970.000,00
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp41.635.000,00
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp135.611.900,00

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang Ekonomi
dan Infrastruktur,

H. Pajar Safari, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 197108231993031004

JF. Perencana,

Arief Fitrianto, SE
Penata
NIP. 196606132015031001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Sub Bidang Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp101.900.000,00
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp81.950.000,00
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp47.450.000,00
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp217.100.000,00

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang Ekonomi
dan Infrastruktur,

H. Pajar Safari, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 197108231993031004

JF. Perencana,

Nor Ifansyah, S.Kom
Penata Muda Tk. I
NIP. 197304152006041013



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit organisasi : Penelitian & Pengembangan Daerah
Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Sosial Budaya
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan sosial budaya	Persentase hasil kajian kelitbangan sosial budaya yang berkualitas	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penelitian Dan Pengembangan Tenaga Kerja	Rp172.835.000,00
2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp88.810.000,00

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan,

Hairani Fauzi, S.P.
Pembina
NIP. 19640504198907 1 001

JF. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

Arif Rahmat Diansyah, S.Sos.
Penata Tk. I
NIP. 19761214 200901 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit organisasi : Penelitian & Pengembangan Daerah
Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Ekonomi
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan ekonomi	Persentase hasil kajian kelitbangan ekonomi yang berkualitas	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp143.135.000,00
2. Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp308.385.000,00
3. Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidng difusi inovasi dan penerapan tekonolgi	Rp176.650.000,00

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan,

Hairani Fauzi, S.P.
Pembina
NIP. 19640504198907 1 001

JF. Peneliti,

Riry Magriaty, SE, M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 19840504 201001 2 024



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag Umum dan Kepegawaian
Atas Nama : IRIYANI
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu	Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan Kenaikan Gaji Berkala yang diproses tepat waktu	100%

Rantau, 17 Januari 2022
Kasubag Umum dan Kepegawaian,

Siti Nur Azizah, S.kom
Penata
NIP.19850112.200904.2.004

Rantau, 17 Januari 2022
Pengadministrasi Umum,

IRIYANI
Penata Muda
NIP.19650518.200701.2.013

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag Keuangan
Atas Nama : Muhammad Syahdani, A.Md
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel.	Persentase laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	100%

Rantau, 17 Januari 2022
Kepala Sub Bagian Keuangan,

Agustin Carolina, SE, MM
Penata Tk. I
NIP.19840801.201001.2.023

Rantau, 17 Januari 2022
Bendahara Pengeluaran,

Muhammad Syahdani, A.Md
Pengatur Tk. I
NIP.19750901.200901.1.006



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag Keuangan
Atas Nama : Siti Marfuah, A.Md
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tertib administrasi keuangan dan pajak yang benar dan akuntabel	Persentase terbny administrasi keuangan dan pajak yang benar dan akuntabel	100%

Kepala Sub Bagian Keuangan,


Agustina Carolina, SE, MM
Penata Tk. I
NIP.19840801 201001 2 023

Rantau, 17 Januari 2022

Pengadministrasi Keuangan,


Siti Marfuah, A.Md
Pengatur Tk. I
NIP.19780415 200901 2 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Subbid Pengendalian
Atas Nama : Sumiati, A. Md
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	Persentase data dan informasi pembangunan yang akurat	100%
2.	Terpenuhinya laporan capaian kinerja program tahunan dan jangka menengah yang tepat waktu dan sesuai standar	Persentase capaian kinerja program tahunan dan jangka menengah yang tepat waktu dan sesuai standar	100%

Rantau, 17 Januari 2022

JF. Perencana


Muhammad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP.19750409 200803 1 001

Pengadministrasi Perencanaan dan Program,


Sumiati, A. Md
Pengatur Tk. I
NIP.19741218 200901 2 002



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Subbid Sumber Daya Manusia
Atas Nama : Faridah Ariani, A. Md
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpeenuhnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra sub bidang SDM yang sesuai standar dan tepat waktu	Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mitra sub bidang SDM sesuai standar dan tepat waktu	100%

Rantau, 17 Januari 2022

JF. Perencana,

Uci Sanusi, SE
Penata

NIP. 19830717 201503 1 001

Pengadministrasi Perencanaan
Dan Program,

Faridah Ariani, A. Md
Pengatur Tk. I

NIP. 19750715 200901 2 004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan
Unit Kerja : Subbid Litbang Sosial Budaya
Atas Nama : Hj. Lili Damayanti
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya hasil kajian kelitbangan sosial budaya yang sesuai standar	Persentase hasil kajian kelitbangan sosial budaya yang sesuai standar	100%

Rantau, 17 Januari 2022

JF. Pemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi,

Arif Rahmat Diansyah, S.Sos
Penata Tk. I

NIP.19760930 200701 2 011

Pengadministrasi Program dan
Tata Operasional Penelitian,

Hj. Lili Damayanti
Penata Muda Tk. I

NIP.19720220 199303 2 003



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan
Unit Kerja : Subbid Litbang Ekonomi
Atas Nama : ISNANIAH
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya hasil kajian kelitbang ekonomi yang sesuai standar	Persentase hasil kajian kelitbang ekonomi yang sesuai standar	100%

Rantau, 17 Januari 2022

Jf. Peneliti,


Riry Magniary, SE, M.Si
Penata Tk. I
NIP.19840504 201001 2 024

Pengadministrasi Program dan
Tata Operasional Penelitian,


ISNANIAH
Pengatur Muda
NIP.19760810 201212 2 00

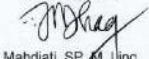
**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Perencanaan dan Pelaporan
Atas Nama : Fajar Suri Kusuma Wardhani, SE
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu	Persentase dokumen Perencanaan perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu Persentase dokumen pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100% 100%

Rantau, 17 Januari 2022

Kasubag Perencanaan
dan Pelaporan,


Mahdiati, SP, M. Ling
Penata Tk. I
NIP.19790507 200501 2 015

Analisis Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan


Fajar Suri Kusuma Wardhani, SE
Penata Muda
NIP.18851030 202203 2 001



LAMPIRAN 5. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 06 Oktober 2022

Pihak Kedua,

 Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

 Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP.19690214 199403 1 011

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Score 8,1 (sangat baik)
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	90%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	90%
3	Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan	90%
		Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.811.710.645,00	Sumber Dana APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.788.882.900,00	Sumber Dana APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp1.138.771.500,00	Sumber Dana APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp1.293.829.000,00	Sumber Dana APBD

Rantau, 06 Oktober 2022

Pihak Kedua,

 Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

 Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP.19690214 199403 1 011



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	80% 90%
2.	SDM yang berkualitas	Persentase ASN dengan capaian kinerja $\geq 90\%$	90%

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp46.700.000,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.938.811.729,00
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.525.783.600,00
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp320.073.300,00
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp594.793.616,00
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp185.588.400,00

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19690214 199403 1 011

Rantau, 06 Oktober 2022

Sekretaris,

Dr. H. Melv Harris Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP.19840522 200803 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp172.835.000,00
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp451.520.000,00
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp561.980.000,00

Rantau, 06 Juli 2022

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Mahdiali, SP, M. Ling
Pembina
NIP. 19790507 200501 2 015



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbang yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil kelitbang yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp166.385.000,00
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp310.905.000,00
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp816.539.000,00

Rantau, 06 Oktober 2022
Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Agli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Rantau, 06 Oktober 2022
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Mahdiati, SP, M, Ling
Pembina
NIP. 19790507 200501 2 015

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah mitra bidang Sosial dan SDM	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang sosial dan SDM	90%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp468.089.800,00

Rantau, 30 Mei 2022
Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Agli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Rantau, 30 Mei 2022
Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia,

Muhamed Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200803 1 001



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah mitra bidang Sosial dan SDM	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang sosial dan SDM	90%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp422.864.800,00

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Rantau, 06 Oktober 2022
Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia,

Muhamad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200803 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	90%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan (SDA) Sumber Daya Alam	Rp311.991.700,00
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp403.915.000,00

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Rantau, 06 Oktober 2022
Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur,

H. Pajar Satrio, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710823 199303 1 004



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan Dan Pengendalian
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
2.	Meningkatnya kualitas capaian kinerja program prioritas daerah	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	80%

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp1.175.412.800,00
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp416.480.300,00
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp196.990.000,00

Rantau, 06 Oktober 2022

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zeinal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian,

Zulfian Rizki, ST, M, Eng
Pembina
NIP. 19780804 200604 1 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%
		Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp27.300.000,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp29.200.000,00

Rantau, 11 Juli 2022

Sekretaris,

H. Meidy Harris Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP. 19840522 200803 1 001

Pt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan,

Fajar Suri Kusuma Wardhani, SE
Penata Muda
NIP. 19851030 201903 2 001



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%
		Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp32.050.000,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp12.650.000,00

Rantau, 06 Oktober 2022

Pt. Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan,


Fajar Suri Kusuma Wardhani, SE
Penata Muda
NIP. 19851030 201903 2 001

Sekretaris,


Dr. H. Meldy Harris Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP.19840522 200803 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Administrasi Keuangan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
		persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Rp4.907.407.829,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp24.803.900,00
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tiwulanan/Semesteran SKPD	Rp6.600.000,00

Rantau, 06 Oktober 2022

Kepala Sub Bagian Keuangan,


Dr. H. Meldy Harris Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP.19840522 200803 1 001


Agustin Carolina, SE, MM
Penata Tk.I
NIP. 19840801 201001 2 023



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Sub Bidang Pengendalian
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas kinerja Program Prioritas Daerah	Peningkatan capaian kinerja Program Prioritas Daerah yang tercapai	100%
2.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi Indikator Kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota	Rp141.080.000,00
2. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan bidang pelaksanaan pembangunan daerah	Rp136.010.000,00
3. Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan daerah	Rp194.500.000,00
4. Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan pembangunan SKPD	Rp456.910.000,00

Rantau, 30 Mei 2022

Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian,

Zulhan Radmi, ST, M. Eng
Pembina
NIP. 19780804 200604 1 004

JF, Perencana,

M. Hilmi Jamaluddin, SE
Penata
NIP. 19920129 201503 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappelitbang	score 4,3
2.	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
3.	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp18.369.6000,00
2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp455.887.900,00
3. Penyediaan bahan logistik kantor	Rp161.618.500,00
4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp29.216.400,00
5. Penyediaan bahan/material	Rp27.626.200,00
6. Fasilitasi kunjungan tamu	Rp18.750.000,00
7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp1.814.273.000,00
8. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp320.073.300,00
9. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp487.612.500,00
10. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp14.207.116,00
11. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp92.974.000
12. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp144.595.200,00
13. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp40.973.200,00

Rantau, 05 Oktober 2022

Sekretaris,

Dr. H. Meldy Heris Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP. 19840522 200803 1 001

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Siti Nur Azizah, S.Kom
Penata Tk. I
NIP. 19850112 200904 2 004



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Sub Bidang Perencanaan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase hasil berita acara Musrenbang di semua level tingkatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%
2.	Terwujudnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	100%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja Program Prioritas Daerah	Peningkatan capaian kinerja Program Prioritas Daerah yang tercapai	100%
4.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan Informasi Indikator Kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp17.245.000,00
2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp37.213.600,00
3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp139.528.000,00
4. Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan	Rp225.578.800,00
5. Koordinasi Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Rp755.846.200,00
6. Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota	Rp104.480.000,00
7. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan bidang pelaksanaan pembangunan daerah	Rp92.510.000,00
8. Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan daerah	Rp214.500.000,00
9. Pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan pembangunan SKPD	Rp201.980.300,00

Rantau, 06 Oktober 2022
Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian,

Zulfian Redmi / ST, M. Eng
Pembina
NIP. 19780804 200604 1 004

Rantau, 06 Oktober 2022
JF. Perencana,

M. Hilmi Jamaluddin, SE
Penata
NIP. 19920129 201503 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Sub Bidang Ekonomi
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Rp59.562.300,00
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp75.182.500,00
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp431.635.000,00
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Rp135.611.900,00

Rantau, 06 Oktober 2022

Kepala Bidang Ekonomi
dan Infrastruktur,

H. Pajar Sari, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710823 199303 1 004

JF. Perencana,

Arief Fitrianto, SE
Penata
NIP. 19860613 201503 1 001



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Sub Bidang Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp77.415.000,00
2. Aistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp61.950.000,00
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp47.450.000,00
4. KoordinasiPelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp217.100.000,00

Rantau, 06 Oktober 2022

Kepala Bidang Ekonomi
dan Infrastruktur,

H. Pajjar Safari, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710823 199303 1 004

J.F. Perencana,

Nor Ifansyah, S.Kom
Penata Muda Tk. I
NIP. 19730415 200604 1 013

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Sub Bidang Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub Bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub Bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang SDM	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang SDM yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp103.594.800,00
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp79.820.000,00
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp48.550.000,00

Rantau, 06 Oktober 2022

Kepala Bidang Sosial
Dan Sumber Daya Manusia,

Muhamad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200803 1 001

J.F. Perencana,

Uci Sanusi, SE
Penata
NIP. 19830717 201503 1 001



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit organisasi : Penelitian & Pengembangan Daerah
Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Sosial Budaya
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan sosial budaya	Persentase hasil kajian kelitbangan sosial budaya yang berkualitas	100%

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Penelitian Dan Pengembangan Tenaga Kerja | Rp166.385.000,00 |
| 2. | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Rp129.980.000,00 |

Rantau, 06 Oktober 2022

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan,

Mahdiali, SP, M. Ling
Pembina
NIP. 19790507 200501 2 016

JF. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

Anif Rahmat Diansyah, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19761214 200901 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Sub Bidang Sosial
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub Bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub Bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Sosial	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp77.350.000,00 |
| 2. | Aistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Rp69.850.000,00 |
| 3. | Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Rp43.700.000,00 |

Rantau, 06 Oktober 2022

Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia,

Muhamad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200803 1 001

JF. Perencana,

Evi Selvi Adriani DS, ST
Penata
NIP. 19760930 201406 2 006



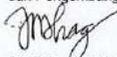
**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit organisasi : Penelitian & Pengembangan Daerah
Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Ekonomi
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan ekonomi	Persentase hasil kajian kelitbangan ekonomi yang berkualitas	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp121.235.000,00
2. Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp189.670.000,00
3. Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidng difusi inovasi dan penerapan teknologi	Rp688.559.000,00

Rantau, 06 Oktober 2022

Kepala Bidang Penelitian
dan Pengembangan,

Mahdiati, SE, M. Ling
Pembina
NIP. 19790507 200501 2 015

JF. Peneliti,

Riry Magriaty, SE, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19840504 201001 2 024



LAMPIRAN 6. MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BAPPELITBANG TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2022

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Score 8,1 (sangat baik)				6.56
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	90%	0%	0%	0%	124,27%
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	90%	0%	0%	0%	94,00%
2.	Meningkatnya hasil kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan	90%	0%	20%	20%	50%
			Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	90%	0%	20%	20%	50%

Pihak Kedua,

Drs. H. M. ARBIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

Dr. H. Zamir Aqil, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19890214 199403 1 011



Unit Organisasi : Sekretariat
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan <i>coverage</i> anggaran 100%	80%	20%	20%	25%	25%
		Adminisitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	90%	20%	20%	25%	25%
2.	SDM yang berkualitas	Administrasi umum perangkat daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja $\geq 90\%$	90%	20%	20%	25%	25%

Kepala Bappelitbang.


Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19690214 199403 1 011

Sekretaris.


Dr. H. Meidy Harris Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP 19840522 200803 1 001



Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti			100%				
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti		0%	50%	25%	25%
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti		-	25%	25%	50%
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti		25%	50%	25%	25%

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Penelitian
dan Pengembangan Daerah,

Mahdiati, SP, M. Ling
Pembina
NIP. 19790507 200501 2 015



Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100%	25%	25%	25%	25%
2.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah mitra bidang Sosial dan SDM	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang sosial dan SDM	90%	25%	25%	20%	20%

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Sosial dan
Sumber Daya Manusia,

Muhamad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200803 1 001



Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan (SDA) Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Bidang Ekonomi	100%	25%	25%	25%	25%
		Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Bidang Infrastruktur	100%	25%	25%	25%	25%
2.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah mitra bidang Sosial dan SDM	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Ekonomi	90%	25%	25%	20%	20%
		Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Infrastruktur	90%	25%	25%	20%	20%

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Ekonomi dan
Infrastruktur

H. Pajar Safari, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710823 199303 1 004



Unit Organisasi : Bidang Perencanaan Dan Pengendalian
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	25%	25%	25%	25%
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
2.	Meningkatnya kualitas capaian kinerja program prioritas daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	80%	20%	20%	20%	20%

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian,

Zulfian Radmi, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19780804 200604 1 004



Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%	25%	25%	25%	25%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%	25%	25%	25%	25%
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%	25%	25%	25%	25%

Sekretaris,

Dr. H. Meidy Harris Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP. 19840522 200603 1 001

NIP. 19690214 199403 1 011

Pit. Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan.

Fajar Suri Kusuma Wardhani, SE
Penata Muda
NIP. 19851030 201903 2 001

NIP. 19780804 200604 1 004



Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Administrasi Keuangan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	25%	25%	25%	25%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%	50%		50%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%		50%		50%

Sekretaris,

Dr. H. Meidy Harnis Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP. 19840522 200803 1 001

Kepala Sub Bagian Keuangan,

Agustina Carolina, SE, MM
Penata Tk I
NIP. 19840801 201001 2 023



Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Bahan / Material Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappelitbang	score 4,3				score 4,3
2.	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	20%	20%	25%	25%
3.	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN	100%	20%	20%	25%	25%

Sekretaris,

Dr. H. Meidy Harris Prayoga, SE, ME

Pembina

NIP. 19840522 200803 1 001

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Siti Nur Azizah, S.Kom

Penata Tk.I

NIP. 19850112 200904 2 004



Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
 Unit Kerja : Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan Koordinasi Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Persentase hasil berita acara Musrenbang di semua level tingkatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%	20%	80%		
	Terwujudnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	100%	20%	80%		
	Meningkatnya kualitas kinerja Program Prioritas Daerah	Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Peningkatan capaian kinerja Program Prioritas Daerah yang tercapai	100%	25%	25%	25%	25%



No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		daerah di kabupaten/kota						
	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan daerah Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan pembangunan SKPD	Persentase ketersediaan data dan informasi Indikator Kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%	25%	25%	25%	25%

Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian,

Zulfan Radmi, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19780804 200604 1 004

Kepala Sub Bidang Perencanaan,

M. Hilmi Jamaluddin, SE
Penata
NIP. 19920129 201503 1 001



Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Sub Bidang Ekonomi
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90%	20%	20%	25%	25%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	25%	25%	25%	25%

Kepala Bidang Ekonomi
dan Infrastruktur.

H. Pajar Safari, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710823 199303 1 004

JF. Perencana.

Arief Fitrianto, SE
Penata
NIP. 19860613 201503 1 001



Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
 Unit Kerja : Sub Bidang Infrastruktur
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub Bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub Bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90%	20%	20%	25%	25%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%	25%	25%	25%	25%

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur,

H. Pajar Safari, S.Sos
 Penata Tk. I
 NIP. 19710823 199303 1 004

JF. Perencana,

Nor Ifansyah, S.Kom
 Penata
 NIP. 19730415 200604 1 013



Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Sub Bidang Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub Bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDM (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDM	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub Bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90%	20%	20%	25%	25%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang SDM	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDM	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang SDM yang ditindaklanjuti	100%	25%	25%	25%	25%

Kepala Bidang Sosial
Dan Sumber Daya Manusia,

Muhamad Khair Rani, SE
Penata Tk. I

NIP. 19750409 200803 1 001

JF. Perencana,

Uci Sahus, SE
Pehata

NIP. 19830717 201503 1 001



Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Sub Bidang Sosial
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub Bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub Bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90%	20%	20%	25%	25%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Sosial	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%	25%	25%	25%	25%

Kepala Bidang Sosial
Dan Sumber Daya Manusia,

Muhamad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200803 1 001

JF. Perencana,

Evi Selvi Adriani DS, ST
Penata
NIP. 19760930 201406 2 006



Unit organisasi : Penelitian & Pengembangan Daerah
Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Sosial Budaya
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan sosial budaya	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kajian kelitbangan sosial budaya yang berkualitas	100%		25%	25%	50%

Kepala Bidang Penelitian
dan Pengembangan Daerah,

Mahdiati, SP., M.Eng
Pembina
NIP. 19790507 200501 2 015

JF. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi,

Ari Rahmat Diansyah, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19761214 200901 1 002



Unit organisasi : Penelitian & Pengembangan Daerah
Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Ekonomi
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan Ekonomi	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidng difusi inovasi dan penerapan tekonoigi	Persentase hasil kajian kelitbangan ekonomi yang berkualitas	100%		25%	25%	50%

Kepala Bidang Penelitian
dan Pengembangan Daerah,

Mahdiati, SP., M.Ling
Pembina

NIP. 19790507 200501 2 015

JF. Peneliti,

Riry Magriaty, SE, M.Si
Penata Tk. I

NIP. 19840504 201001 2 024



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Keuangan
Asas Nama : Muhammad Syahdan, A.Md
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1) 1	(2) Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuratabel.	(3) Persentase laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD yang akurat dan akuratabel	(4) 100%	(5) 25%	(6) 25%	(7) 25%	(8) 25%

Kepala Sub Bagian Keuangan,

Aguslin Carolina, SE, MM
Penata Tk. I
NIP.19840801 201001 2 023

Bendahara Pengeluaran,

Muhammad Syahdan, A.Md
Pengatur Tk. I
NIP.19750901 200901 1 006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Umum dan Kepegawalan
Asas Nama : RIVYANI
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1) 1	(2) Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawalan yang diproses tepat waktu	(3) Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan Kenaikan Gaji Berkala yang diproses tepat waktu	(4) 100%	(5) 25%	(6) 25%	(7) 25%	(8) 25%

Kasubag Umum dan Kepegawalan,

Sri Nur Afifah, S.Kom
Penata Tk. I
NIP.19850112 200904 2 004

Pengedimintasi Umum,

RIVYANI
Penata Muda
NIP.19850518 200701 2 013



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretaris
 Unit Kerja : Subag Perencanaan dan Pelaporan
 Atas Nama : Fajar Surti Kusuma Wardhani, SE
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pelaporan Parangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu	Persentase dokumen Perencanaan perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	25%	25%	-	-
		Persentase dokumen pelaporan Parangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	25%	25%	-	-

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan,
[Signature]
 Mahdati, S.E.,M.Lng
 NIP. 19790607 200501 2 015

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
[Signature]
 Fajar Surti Kusuma Wardhani, SE
 Penata Muda
 NIP. 19851030 202303 2 001

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretaris
 Unit Kerja : Subag Keuangan
 Atas Nama : Siti Mariah, AMd
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terdapat administrasi keuangan dan pajak yang benar dan akurat	Persentase ketidunya administrasi keuangan dan pajak yang benar dan akurat	100%	25%	25%	25%	25%

Kepala Sub Bagian Keuangan,
[Signature]
 Agustih Carolina, SE, MM
 Pencat Tk. I
 NIP. 19840801 201001 2 023

Pengadministrasi Keuangan,
[Signature]
 Siti Mariah, AMd
 Pengatur Tk. I
 NIP. 19750415 200901 2 005



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Subbid Pengendalian
Asas Nama : Sumlati, A. Md
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	Persentase data dan informasi pembangunan yang akurat	100%	25%	25%	25%	25%
2.	Tersedianya laporan capaian kinerja program tahunan dan jangka menengah yang tepat waktu dan sesuai standar	Persentase capaian kinerja program tahunan dan jangka menengah yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	25%	25%	25%	25%

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian,

Zulfan Radhi, ST, M.Eng
Pemula
NIP. 19780804 200604 1 004

Pengelola Bahan Perencanaan,

Sumlati, A. Md
Pengatur Tk. I
NIP. 19741218 200901 2 002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag Perencanaan dan Pelaporan
Asas Nama : Fajar Suri Kusuma Wardhani, SE
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu	Persentase dokumen Perencanaan perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	-	-	25%	25%
		Persentase dokumen pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	-	-	25%	25%

Plt. Kasubag Perencanaan
dan Pelaporan,

Fajar Suri Kusuma Wardhani, SE
Pemula Muda
NIP. 19851030 202303 2 001

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
 Unit Kerja : Subbid Sumber Daya Manusia
 Asas Nama : Fardah Arhan, A. Md
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perbaikinya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra sub bidang SDM yang sesuai standar dan tepat waktu	Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mitra sub bidang SDM sesuai standar dan tepat waktu	100%	25%	25%	25%	25%

Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia,

 Muhammad Akbar Rani, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19750409 200803 1 001

Pengadministrasi Perencanaan Dan Program,

 Fardah Arhan, A. Md
 Pengantar Tk. I
 NIP. 19750715 200901 2 004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan
 Unit Kerja : Subbid Litbang Sosial Budaya
 Asas Nama : H. Lili Damayanti
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya hasil kajian kelibangan sosial budaya yang sesuai standar	Persentase hasil kajian kelibangan sosial budaya yang sesuai standar	100%	25%	25%	25%	25%

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

 Mahdiat, SP-M.Ling
 Pembina
 NIP. 19790507 200501 2 015

Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian,

 H. Lili Damayanti
 Penata Muda Tk. I
 NIP. 19720230 199303 2 003



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan
Unit Kerja : Subbid Litbang Ekonomi
Atas Nama : ISNANIAH
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya hasil kajian keibngan ekonomi yang sesuai standar	Persentase hasil kajian keibngan ekonomi yang sesuai standar	100%	25%	25%	25%	25%

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

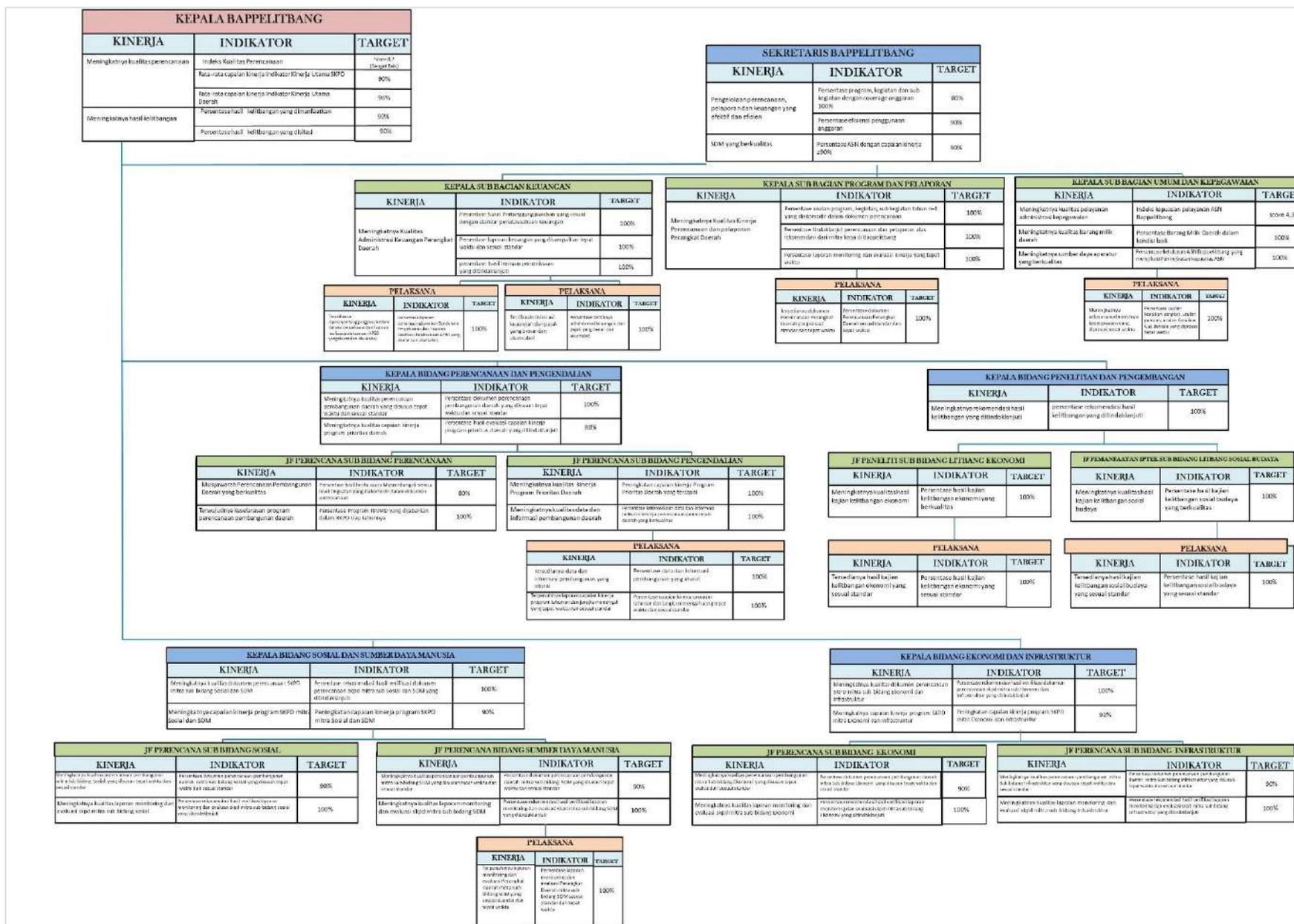
Mahdiati, SP, M.LiHg
Pembina
NIP. 19790607 200501 2 015

Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian,

ISNANIAH
Pengatur Muda
NIP. 19760910 201212 2 003



LAMPIRAN 7. POHON KINERJA (CASCADING) BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022





LAMPIRAN 8. MONITORING DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANG 2022

MCNEV RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANG																							
No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun ke-				Unit Penanggung Jawab				
					K	Rp.	2021		2022		2022 TW I		2022 TW II		2022 TW III		2022 TW IV			2022		2023	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	[22]		
1	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan Perencanaan pembangunan daerah		Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100																	Sekretaris		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100%	1,953,268,826	100%	1,623,291,077	100%	1,732,911,281	280,599,288	50%	541,792,559	1,183,753,638	100%	1,685,164,824	100%	97%	0	0.00			
		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100	100%	700,000,000	100%	447,634,967	100%	477,862,990	25%	125,553,368	50%	248,294,239	75%	832,873,999	100%	824,882,358	100%	173%	0	0.00	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	100%	138,076,249	100%	28,271,682	100%	30,180,820	25%	345,914,498	50%	1,593,078,041	75%	3,269,218,636	100%	4,078,012,876	100%	13512%	0	0.00	
2	Meningkatnya kualitas perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan		Score 8,1		Score 6,2	1,116,016,700	Score 8,1	2,045,000,000	25%	897,918,800	50%	508,314,800	75%	318,899,150	100%	883,817,500	80%	49%		Kabid Randal, Kabid Eclin, Kabid Sos SDM	
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur					370,104,200	90%		215,000,000	25%	10,200,000	50%	38,766,600	75%	61,025,600	100%	187,981,600	111%	87%			
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan SDM						90%		160,000,000	25%	10,860,000	50%	57,665,500	75%	60,595,500	100%	204,618,500	111%	128%			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah			80%	499,058,000	90%		205,000,000	25%	27,600,000	40%	107,984,400	60%	215,050,000	80%	443,045,400	89%	216%		
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur		Rata-rata capaian kinerja indikator Kinerja Utama SKPD			80%	140,459,400	90%		215,000,000	25%	5,660,000	50%	26,002,000	75%	33,831,600	100%	63,218,000	111%	29%		
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan SDM							90%		200,000,000	25%	5,600,000	50%	28,326,400	75%	41,357,500	100%	66,452,600	111%	33%		
3	Meningkatnya hasil kelibangan	Program penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kelibangan dimanfaatkan			80%	742,967,600	90%	445,000,000	25%	3,600,000	75%	60,765,000	100%	634,518,700	100%	1,017,660,900	111%	229%		Kabid litbang		
			Persentase hasil kelibangan yang disitasi					90%		25%		75%		100%									

23 Januari 2023
Kepala BAPPELITBANG
BAPPELITBANG
Dr. H. Laili Aqli, ST, MT
1990214 1994031 011



LAMPIRAN 9. MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN 2022**

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3				4	5	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-capaian kinerja kegiatan sekretariat	8,611,710,645	25%	25%	25%	25%	Sekretariat
SDM yang berkualitas	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	20%	20%	25%	25%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	2,525,763,600	20%	20%	25%	25%	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappelitbang	18,389,600				score 4,3	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	455,887,900	25%	25%	25%	25%	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor		161,618,500	25%	25%	25%	25%	
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		29,218,400	25%	25%	25%	25%	
						Penyediaan Bahan / Material		27,626,200	25%	25%	25%	25%	
						Fasilitas Kunjungan Tamu		18,750,000	25%	25%	25%	25%	
						Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN	1,814,273,000	10%	25%	25%	40%	
SDM yang berkualitas	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	20%	20%	25%	25%	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	320,073,300	20%	20%	25%	25%	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	320,073,300	10%	25%	25%	40%	
SDM yang berkualitas	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	20%	20%	25%	25%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	584,793,616	20%	20%	25%	25%	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik	Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappelitbang	487,612,500				score 4,3	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		14,207,116				score 4,3	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		92,974,000				score 4,3	
SDM yang berkualitas	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	20%	20%	25%	25%	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	185,568,400	20%	20%	25%	25%	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	144,595,200	10%	25%	25%	40%	
						Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya		40,973,200	10%	25%	25%	40%	



Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	20%	20%	20%	20%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	46,700,000	20%	20%	20%	20%	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	32,050,000	25%	25%	25%	25%	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	14,650,000	25%	25%	25%	25%	
Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	20%	20%	25%	25%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	4,938,811,729	20%	20%	25%	25%	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	4,907,407,829	25%	25%	25%	25%	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	24,803,900	50%		50%		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	persentase hasil temuan pemeriksaan yang difindaklanjuti	6,600,000		50%		50%	



Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab	
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		
Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan				Score 8.1 (sangat baik)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Rp1,224,845,000.00					Score 5,56	Bidang Randal
						Penyusunan Perencanaan dan Pedanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	1,175,412,800	26%	26%	26%	26%		
						Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan	Persentase hasil berita acara musrenbang di semua level tingkatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	225,578,800	20%	80%				
						Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		37,213,600	20%	80%				
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		139,528,000	20%	80%				
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPDP tiap tahunnya	17,246,000	0%	0%	0%	0%		
						Koordinasi Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota		755,846,200	25%	25%	50%			
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Rp416,480,300.00	25%	25%	25%	25%		
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas	214,500,000	0%	25%	50%	25%		
						Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan pembangunan SKPD		201,980,300	25%	50%	25%	0%		
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Rp409,721,700.00					6.54	Bidang Ekoin
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	Rp139,365,000.00	25%	25%	25%	25%		
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra sub bidang infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	77,415,000	25%	25%	25%	25%		
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		61,950,000	25%	25%	25%	25%		
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan (SDA) Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	Rp270,366,700.00	25%	25%	25%	25%		
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra sub bidang ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	59,562,300	25%	25%	20%	20%		
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan		75,182,500	25%	25%	20%	20%		
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		135,611,900	25%	25%	20%	20%		
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Rp330,614,800.00			50%	50%		Bidang SDM dan Sosial
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	Rp330,614,800.00	25%	25%	25%	25%		
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra sub bidang sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	77,350,000	25%	25%	20%	20%		
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		89,850,000	25%	25%	20%	20%		
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra sub bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	103,594,800	25%	25%	20%	20%		
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		79,820,000	25%	25%	20%	20%		



Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	20%	20%	25%	25%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	Rp196,990,000.00	0%	0%	0%	124.27%	Bidang Randal
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	Rp196,990,000.00	25%	25%	25%	25%	
						Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Peningkatan capaian kinerja program prioritas daerah yang tercapai	Rp92,510,000.00	25%	25%	25%	25%	
						Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota		Rp104,480,000.00	25%	25%	25%	25%	
Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	20%	20%	25%	25%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	Rp133,885,000.00	0%	0%	0%	94%	Bidang Ekonomi Infrastruktur dan Bidang SDM Sosial
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan (SDA) Sumber Daya Alam	Peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah mitra bidang Perekonomian Infrastruktur	Rp41,635,000.00	25%	25%	20%	20%	
						Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra sub bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	41,635,000	25%	25%	25%	25%	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah mitra bidang Perekonomian Infrastruktur	Rp47,450,000.00	25%	25%	20%	20%	
						Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra sub bidang infrastruktur yang ditindaklanjuti	47,450,000	25%	25%	25%	25%	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan SDM	Peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah mitra Sosial dan bidang SDM	Rp92,250,000.00	25%	25%	20%	20%	
						Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra sub bidang sosial yang ditindaklanjuti	43,700,000	25%	25%	25%	25%	
						Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDM	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra sub bidang SDM yang ditindaklanjuti	48,550,000	25%	25%	25%	25%	



Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya hasil kelibangan	1. Persentase hasil kelibangan dimanfaatkan			50%	40%	Pogram penelitian dan Pengembangan	1. Persentase hasil kelibangan dimanfaatkan	Rp 1,293,829,000.00	0%	20%	20%	50%	Bidang Litbang
	2. Persentase hasil kelibangan yang disitasi			50%	40%				2. Persentase hasil kelibangan yang disitasi	0%	20%	20%	
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil kelibangan yang ditindaklanjuti	Rp816,539,000.00	0%	50%	25%	25%	
						Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Persentase hasil kelibangan ekonomi yang berkualitas	Rp686,559,000.00	-	50%	25%	25%	
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Persentase hasil kelibangan sosial budaya yang berkualitas	Rp129,980,000.00	-	25%	25%	50%	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil kelibangan yang ditindaklanjuti	Rp166,385,000.00	-	25%	25%	50%	
						Penelitian Dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase hasil kelibangan sosial budaya yang berkualitas	Rp166,385,000.00		25%	25%	50%	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	persentase rekomendasi hasil kelibangan yang ditindaklanjuti	Rp310,905,000.00	25%	50%	25%		
						Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase hasil kelibangan ekonomi yang berkualitas	Rp189,670,000.00	50%	50%			
						Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan		Rp121,235,000.00	25%	50%	25%		

Rantau, 23 Januari 2023
 KEPALA BAPPELITBANG,

 Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT
 NIP.19690214 199403 1 011



LAMPIRAN 10. MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPELITBANG TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

Nomor : 050 / 140 - Sekrt/Bappelitbang Rantau, 8 April 2022
 Lampiran : -
 Perihal :

Kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Sekretaris Bappelitbang
2. Kabid Bappelitbang
3. Kasubbag Bappelitbang
4. JFT Bappelitbang
5. Staf Bappelitbang

di -
Tempat

Seiring dengan penyusunan dokumen Proses Bisnis (Probis) Bappelitbang, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 11 April 2022
 Waktu : 09:00 WITA s/d Selesai
 Tempat : Aula Bappelitbang
 Agenda : Monev Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala

Dr. H. Zainal Aqil, ST., MT
 NIP. 19650214 199403 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

NOTULEN RAPAT

Agenda : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Sehubungan dengan berakhirnya triwulan I Tahun 2022, maka dengan ini Bappelitbang Kab. Tapin mengadakan rapat evaluasi kinerja untuk mengetahui tingkat realisasi kegiatan yang sudah dicapai dan halangan apa saja yang dihadapi sampai dengan triwulan I ini beserta solusi ataupun tindakan yang dapat dilakukan sebagai langkah mitigasi terkait kendala ataupun halangan terhadap realisasi kegiatan.

Dalam rapat evaluasi ini, Kepala Bappelitbang memimpin rapat yang dimoderatori oleh Sekretaris Bappelitbang dan dihadiri pejabat eselon III, Eselon IV dan JFT beserta staf Bappelitbang.

Beberapa pokok bahasan yang didiskusikan pada rapat ini adalah tingkat realisasi kegiatan dan capaian kinerja per triwulan I tahun 2022. Kendala yang dialami dalam realisasi untuk beberapa kegiatan yang realisasinya dianggap masih dibawah target. Rencana tindakan mitigasi terhadap halangan yang dihadapi pada saat triwulan I dan mungkin terjadi lagi pada triwulan selanjutnya.

Notulis,

 Muhammad Rizkie.



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin / 27 Juni 2022
Waktu : 13.30 WITA s/d Selesai
Tempat : Aula Perencanaan Bappelitbang
Agenda : Penyusunan Proses Bisnis (Probis) Bappelitbang

NO	NAMA	P/L	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Zainal Aqli	L	Kepala	
2	H. Meidy Harris P	L	Sekretaris	
3	Moh. Rizki			
4	H. Rizwan Saefani	L	Kabid Ekam	
5	M. Rizki L H	L	Staf	
6	Nor Yungel	L	St. Perencana	
7	Iriyani	P	staf	
8	Agusdi	P	Kasubid umpan	
9	M. Hilmi J	L	DET Perencana	
10	Azul Azmi	L	Staf Bappelitbang	
11	Azwar Anwar	P	staf	
12	Sermiah	P	staf	
13	Ratumania Arini	P	staf	
14	Siti Arsyah	P	staf	
15	Ratri Rida Ayu	P	staf	
16	M. Fauzi	L	Staf	
17	Siti Rahmah	P	staf	
18	M. Khairul Anwar	L	staf	
19	uci Susmi	L	st. Perencana	
20	Amin. Z. P	P	staf	
21	fahry P.	L	-	
22	Rizwan Rizwan	L	staf	
23	Latman Khairi	L	staf	
24	M. Rangan Wardhana	L	staf	





Nomor : 050 / 242 - Sekrt/Bappelitbang Rantau, 7 Juli 2022
Lampiran : -
Perihal :

Kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Sekretaris Bappelitbang
2. Bapak/Ibu Eselon III Bappelitbang
3. Bapak/Ibu Eselon IV Bappelitbang
4. Bapak/Ibu JFT Bappelitbang
5. Staf Bappelitbang

di -
Tempat

Seiring dengan berakhirnya Triwulan II Tahun 2022 dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir dalam acara yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at / 8 Juli 2022
Waktu : 08.30 WITA s/d Selesai
Tempat : Aula Perencanaan Bappelitbang
Agenda : Monev Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 Bappelitbang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

BAPPE
LITBANG

Dr. H. Zainal Aqli, ST., MT
NIP. 19690214 199403 1 011



NOTULEN RAPAT

Agenda : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022
Tempat : Aula Perencanaan Bappelitbang
Waktu / Tanggal : 08.30 s/d Selesai

Sehubungan dengan berakhirnya triwulan II Tahun 2022, maka dengan ini Bappelitbang Kab. Tapin mengadakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja untuk mengetahui tingkat realisasi yang sudah dicapai dan halangan apa saja yang ditemui beserta solusi untuk meminimalisir dampak halangan tersebut terhadap realisasi.

Dalam rapat Monitoring dan evaluasi Kinerja Triwulan II ini, Kepala Bappelitbang berperan sebagai pemimpin rapat dan Sekretaris Bappelitbang bertugas sebagai moderator acara yang turut serta dihadiri oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV, JFT dan Staf Bappelitbang.

Dalam rapat kali ini, dibahas beberapa hal sebagai berikut:

1. Diskusi terkait tingkat penyerapan anggaran bappelitbang dan capaian kinerja Bappelitbang sampai dengan Triwulan II. Yang mana rata-rata capaian untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sudah mencapai 40%, capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah sudah mencapai 50%, Capaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sudah mencapai 50%, dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sudah mencapai 20%.
2. Berdasarkan tingkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II, kemudian didiskusikan apa saja halangan terhadap realisasi yang sudah dihadapi sampai dengan Triwulan II dan apa saja solusi yang sudah diambil serta rencana mitigasi yang akan dilakukan.

Notulis,

M. Rizkie L.H



Monev Peneksi Tu II



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jum'at / 8 Juli 2022
Waktu : 08.30 WITA s/d Selesai
Tempat : Aula Perencanaan Bappelitbang
Agenda : Monev Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

NO	NAMA	P/L	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dr Zainal Agli, ST MT	L	Kepala	
2	H Meidy Harris P.	L	Setretaris	
3	M. Kham Rani	L	Kabid Sos spm	
4	M. H. H. H.	P	Kasubag Perencanaan	
5	M. H. H. H.	L	STF Perencana	
6	Siti Nur Azizah	P	Kasubag urusan	
7	Fajar Suci	P	Staff	
8	Uci Samsi	L	Perencana	
9	Fahdau Ariani	P	STAF OPERASIONAL	
10	Anwar Anwar	L	Staff	
11	Rani Z.P	P	Staff	
12	Raudhatul Jannah	P	Staff	
13	Rusfian Hidar	L	Staff	
14	M. Rahman. Khairi	L	Staff	
15	M. Rizkie Lambang H.	L	Staff	
16	Nor Hengyal	L	STAF PERACAN	
17	M. Khairul A	L	Staff	
18	Selchani	L	Staff	
19				
20				
21				
22				
23				
24				



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

RANTAU

Kode Pos : 71114

Nomor : 050 / 347 - Sekr/Bappelitbang Rantau, 7 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Intern

Kepada Yth Bapak/Ibu:

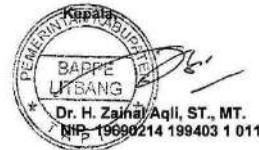
1. Sekretaris Bappelitbang
2. Kabid Bappelitbang
3. Kasubbag Bappelitbang
4. Pejabat Fungsional Bappelitbang
5. Staf Bappelitbang

di - Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya triwulan III tahun 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir dalam acara yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 10 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai II
Agenda : **Monev Kinerja Bappelitbang tw III Tahun 2022 dan Monev Renstra tw I, II dan III.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

RANTAU

Kode Pos : 71114

Notulen Rapat

Hari, Tanggal : **Senin, 10 Oktober 2022**
Pukul : **10:00 WITA s/d selesai**
Tempat : **Aula Perencanaan Bappelitbang**
Agenda : **Monev Evaluasi Kinerja Bappelitbang TW III Tahun 2022 & Monev Renstra TW I, II, dan III.**

Sehubungan dengan berakhirnya triwulan III tahun anggaran 2022, Bappelitbang mengadakan sebuah rapat dengan agenda monitoring dan evaluasi terkait kinerja bappelitbang sampai dengan triwulan III ini bersama dengan permasalahan yang dihadapi beserta kemungkinan permasalahan yang mungkin dihadapi pada triwulan berikutnya.

Rapat monitoring dan evaluasi ini dipimpin oleh kepala Bappelitbang dan dimoderatori oleh Sekretaris serta dihadiri oleh para Kepala Bidang dan JFT Bappelitbang beserta dengan staf.

Pada rapat kali ini dibahas sudah sejauh mana realisasi kinerja Bappelitbang sampai dengan akhir Triwulan ke III ini dan diketahui bahwa realisasi Bappelitbang masih berada dalam target dan dibahas juga perihal potensi hambatan yang dapat menghambat capaian kinerja Bappelitbang di triwulan IV dan apa saja yang dapat dilakukan untuk memitigasi hambatan tersebut lebih berfokus pada beberapa kegiatan yang lebih penting terlebih dahulu.

Pada kesempatan ini juga dibahas terkait Renstra Bappelitbang triwulan I, II, dan III serta perkembangannya sampai dengan triwulan ke III ini.

Notulis,

M. Rizkie L.H





Rapat Intern Bappelibang
Monev Kinerja Triwulan III dan Money Renstra I, II, dan III Tahun 2022





Nomor : 050 / 24 - Sekrt/Bappelitbang Rantau, 6 Januari 2023
Lampiran : -
Perihal : Rapat Intern

Kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Sekretaris Bappelitbang
2. Kabid Bappelitbang
3. Kasubag Bappelitbang
4. Pejabat Fungsional Bappelitbang
5. Staf Bappelitbang

di - Tempat

Sehubungan berakhirnya triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dan dimulainya Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 10 Januari 2023
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Data Bappelitbang
Agenda : **Monev Kinerja dan Monev Renstra Bappelitbang Triwulan IV Tahun 2022**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

Dr. H. Zainal Aqli, ST. MT.
NIP. 19690214 199403 1 011



Notulen Rapat

Hari, Tanggal : **Senin, 10 Januari 2022**
Tempat : **Aula Perencanaan Bappelitbang**
Agenda : **Monev Kinerja dan Monev Renstra Bappelitbang TW IV Tahun 2022**

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, Bappelitbang mengadakan sebuah rapat dengan agenda monitoring dan evaluasi terkait kinerja bappelitbang sampai dengan triwulan IV beserta dengan permasalahan dan halangan yang dihadapi selama pelaksanaan semua kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dan rencana mitigasi untuk mencegah dan/atau meminimalisir permasalahan dan halangan tersebut agar tidak mengganggu jalannya kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 ini.

Rapat monitoring dan evaluasi ini dipimpin dan dimoderatori oleh Sekretaris Bappelitbang karena pada saat yang sama Kepala Bappelitbang sedang ada kesibukan lain.

Pada rapat kali ini diketahui bahwa serapan anggaran Bappelitbang berada pada 76% dari total anggaran, namun tidak banyak mempengaruhi capaian kinerja Bappelitbang yang sudah memenuhi target. Dengan ini diketahui bahwa Bappelitbang telah menggunakan anggaran dengan efisien dalam melaksanakan kegiatannya dan dapat memitigasi permasalahan dengan baik sehingga kegiatan Bappelitbang dapat berjalan dengan lancar.

Selain dari serapan anggaran, dibahas juga terkait capaian rencana strategis Bappelitbang yang mana sudah memenuhi target yang sebelumnya ditetapkan

Notulis,

Muhammad Rizkie Lambang Hermawan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

RANTAU

Kode Pos : 71114

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 10 Januari 2023
Tempat : Aula Perencanaan Bappelitbang Kab. Tapin
Agenda : Monev Kinerja dan Monev Renstra Triwulan IV Bappelitbang Kab. Tapin

NO	NAMA	INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	Dr. Zainal Aqli	Bappelitbang		
2	Medy H.P	Bappelitbang		
3	M. Khair Rani	Bappelitbang	L	
4	Dhidiate	-u-	P	
5	H. Pagar Safuri	-u-	L	
6	Evi Selvi APS	-u-	P	
7	Riny Magniety	Bappelitbang	P	
8	ARIP R.P	Bappelitbang	L	
9	Nor Yusygal	Bappelitbang	L	
10	Lei Shrud	-u-	L	
11	Arip Ibrinjo	-u-	L	
12	AGUSTIN CAROLINA	-u-	P	
13	Fajar Sari	Bappelitbang	P	
14	Zulfian Prokani	-u-	L	
15	Sumiati	-u-	P	
16	FARDAH ARIANI	-u-	P	
17	M. Syahdani	-u-	L	
18	LILI P.	BAPPELITBANG	P	
19	Isnaniah	-u-	P	
20	RUSFIAN NOOR	-u-	L	
21	Mardiah	-u-	P	
22	Itiyah	-u-	P	





LAMPIRAN 11. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021, PERSIAPAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PERSIAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN LKJIP BAPPELITBANG.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

RANTAU

Kode Pos : 71114

Nomor : 050 /04 - Sekr/Bappelitbang Rantau, 30 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Intern

Kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Sekretaris Bappelitbang
2. Kabid Bappelitbang
3. Kasubag Bappelitbang
4. Pejabat Fungsional Bappelitbang
5. Staf Bappelitbang

di -

Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dan dimulainya Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 3 Januari 2022
 Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
 Tempat : Aula Perencanaan Bappelitbang
 Agenda : Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan
 Persiapan Penyusunan Dokumen Laporan LKIP,
 LKPJ, dan LPPD Bappelitbang Tahun 2021

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,
 BAPPE
 LITBANG
 Dr. H. Zainal Aqli, ST. MT.
 NIP. 19690214 199403 1 011

SUDAH DIPERIKSA
 Oleh PPK - SKPD
 TANGGAL : 3
 WAF



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

RANTAU

Kode Pos : 71114

Notulen Rapat

Hari, Tanggal : **Senin, 3 Januari 2022**
 Tempat : **Aula Perencanaan Bappelitbang**
 Agenda : **Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Persiapan
 Penyusunan Dokumen LKJIP, LKPJ, dan LPPD
 Bappelitbang Tahun 2021**

Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, dengan ini Bappelitbang menyelenggarakan sebuah rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dimoderatori oleh Sekretaris serta dihadiri oleh Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan Staf Bappelitbang.

Pada rapat kali ini, dibahas mengenai capaian kinerja dan serapan anggaran Bappelitbang tahun 2021. Dibahas juga mengenai halangan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan Bappelitbang dan potensi halangan tersebut kembali muncul di tahun 2022 serta langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mencegah halangan yang sama untuk terjadi di tahun 2022. Hasil dari pembahasan ini kemudian dimanfaatkan sebagai bahan untuk penyusunan dokumen laporan berupa Lkjip, LKPJ dan LPPD Bappelitbang.

Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan pembahasan terkait realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021 yang mana hasil realisasi perjanjian kerja tahun 2021 ini akan dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan untuk penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 dan penetapan target kinerjanya.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam rapat kali ini adalah perombakan jabatan Kepala Sub Bidang (eselon IV) yang dihapuskan dan digantikan dengan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Notulis,

Muhammad Rizkie Lambang Hermawan

SUDAH DIPERIKSA
 Oleh PPK - SKPD
 TANGGAL : 3
 WAF



DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 3 Januari 2022
Waktu : 09:00 s.d selesai
Tempat : Aula Perencanaan Bappelitbang
Agenda : Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun dan Persiapan Penyusunan Dokumen LkjiP, LKPJ, dan LPPD Bappelitbang Tahun 2021

NO	NAMA	INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Zainal Aqli	Bappelitbang	L	[Signature]
2	[Signature]	Bapelitbang	L	[Signature]
3	M. Ichaini Putri	Bappelitbang	L	[Signature]
4	H. Pagar Sufyani	-	L	[Signature]
5	Mahdiati	-	P	[Signature]
6	Zulfian Radmi	-	L	[Signature]
7	Fajar Sidi	Bappelitbang	P	[Signature]
8	Arief Fitrianto	-	L	[Signature]
9	ARIF R. D	Bappelitbang	L	[Signature]
10	Nes Usmanzal	Bappelitbang	L	[Signature]
11	Putri Rida Ayu	-	P	[Signature]
12	Zetairi Yulha	-	L	[Signature]
13	Evi Selvi Aps	-	P	[Signature]
14	Uci Sanusi	-	L	[Signature]
15	Patiq Nugroffo	-	L	[Signature]
16	Habibi Ibrahim	-	L	[Signature]
17	Rizki Masriaty	-	P	[Signature]
18	AGUSTIN CAROLIAN	-	P	[Signature]
19	Siti Rahmah	-	L	[Signature]
20	M. Kangga Wardhana	-	L	[Signature]
21	Azulv Annas	-	L	[Signature]
22	Siti Aisyah	-	P	[Signature]

NO	NAMA	INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
23	Ruspion Hoor	Bappelitbang	L	[Signature]
24	FARIDAH AHANI	-	P	[Signature]
25	Rohia .Z.P	-	P	[Signature]
26	M. Pake L.H	-	L	[Signature]
27	Iniyani	-	P	[Signature]
28	Raphy Rahni	-	L	[Signature]
29	Denny Mamesa	-	L	[Signature]
30	Sumiati	Bappelitbang	P	[Signature]
31	Rahmy Yulita S	-	P	[Signature]
32	Ahmad Faisal	Bappelitbang	L	[Signature]
33	Muhammad Fauzi	-	L	[Signature]
34	M. syahdani	-	L	[Signature]
35	Martwah	Bappelitbang	P	[Signature]
36	Raihan Khairi	-	L	[Signature]
37	Rahmatia Arini	-	P	[Signature]
38	Azrul Azmi	Bappelitbang	L	[Signature]
39	Rahmatul Jannah	-	P	[Signature]
40	LILI P.	BAPPELITBANG	P	[Signature]
41	Isnawiah	-	P	[Signature]

SUDAH DIPERIKSA
Oleh PPK - SKPD

TANGGAL :
SIMPAN :



SUDAH DIPERIKSA
Oleh BPK - SKPD
ANGGAL :
WAF *[Signature]*



Lampiran 12. Review Draft Dokumen LkjIP Bappelitbang Kabupaten Tapin oleh Tim Sakip Bappelitbang

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

Nomor : 060 / 06 - Sekr/Bappelitbang
 Lampiran : -
 Perihal : Rapat Intern

Rantau, 17 Februari 2023

Kepada Yth Bapak/Ibu:
 TIM SAKIP BAPPELITBANG

di -
 Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbang Kabupaten Tapin yang akan dilaporkan pada 1 Maret 2023. Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir pada acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 20 Februari 2023
 Waktu : 14:00 WITA s.d Selesai
 Tempat : Ruang Data dan Informasi Bappelitbang
 Agenda : Review draft dokumen LKjIP Bappelitbang Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

 Dr. H. Zainal Adli, ST. MT.
 NIP. 19690214 199403 1 011

(Stamp: SUDAH DIPERIKSA Oleh PPK - SIG/P)

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

Notulen Rapat

Hari, Tanggal : Senin, 20 Februari 2023
 Tempat : Ruang Data dan Informasi Bappelitbang
 Pukul : 14:00 Wita s.d selesai
 Agenda : Review draft dokumen LkjIP Bappelitbang Kab. Tapin tahun 2022

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2022, dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin selaku instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya di tahun tersebut. Dengan kewajiban ini kemudian diselenggarakanlah sebuah rapat yang dipimpin oleh kepala bappelitbang, dimoderatori oleh sekretaris dan dihadiri oleh TIM Sakip Bappelitbang.

Pada rapat kali ini, Tim sakip melakukan kegiatan review terhadap draft dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang sebelumnya sudah disusun. Kepala Bappelitbang dan Sekretaris memberikan beberapa arahan terkait penyusunan dokumen LkjIP tersebut kepada TIM Sakip dan bersama dengan TIM Sakip melakukan kegiatan review untuk memastikan bahwa draft tersebut dapat dengan akurat menyampaikan hasil kinerjanya selama tahun anggaran 2022.

Notulis,

 Muhammad Rizkie Lambang Hermawan

(Stamp: SUDAH DIPERIKSA Oleh PPK - SIG/P)



DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 20 Februari 2023
Waktu : 14:00 s.d selesai
Tempat : Ruang Data dan Informasi Bappelitbang
Agenda : Review draft dokumen LKjIP Bappelitbang Tahun 2022

NO	NAMA	INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Zainal Adli	Bappelitbang	L	
2	Wendy H. Pusy	Bappelitbang	L	
3	M. Khairi Rani	Bappelitbang	L	
4	Ibhdiate	-u-	P	
5	H. Pajar Safuri	-u-	L	
6	Evi Solvi ADS	-u-	P	
7	Riy Magniety	Bappelitbang	P	
8	ARIP R. D	Bappelitbang	L	
9	Nor Yusnyal	Bappelitbang	L	
10	Jei Schiud	-u-	L	
11	Arif Fibriono	-u-	L	
12	AGUSTIN CAROLINA	-u-	P	
13	Fajar Sari	Bappelitbang	P	
14	ZulPian Rosani	-u-	L	
15	Surniati	-u-	P	
16	FARIDAH ARIANI	-u-	P	
17	M. Syahdani	-u-	L	
18	LILI P.	BAPPELITBANG	P	
19	Isnaniah	-u-	P	
20	Rusfian Noor	-u-	L	
21	Marwah	-u-	P	
22	Hidayati	-u-	P	

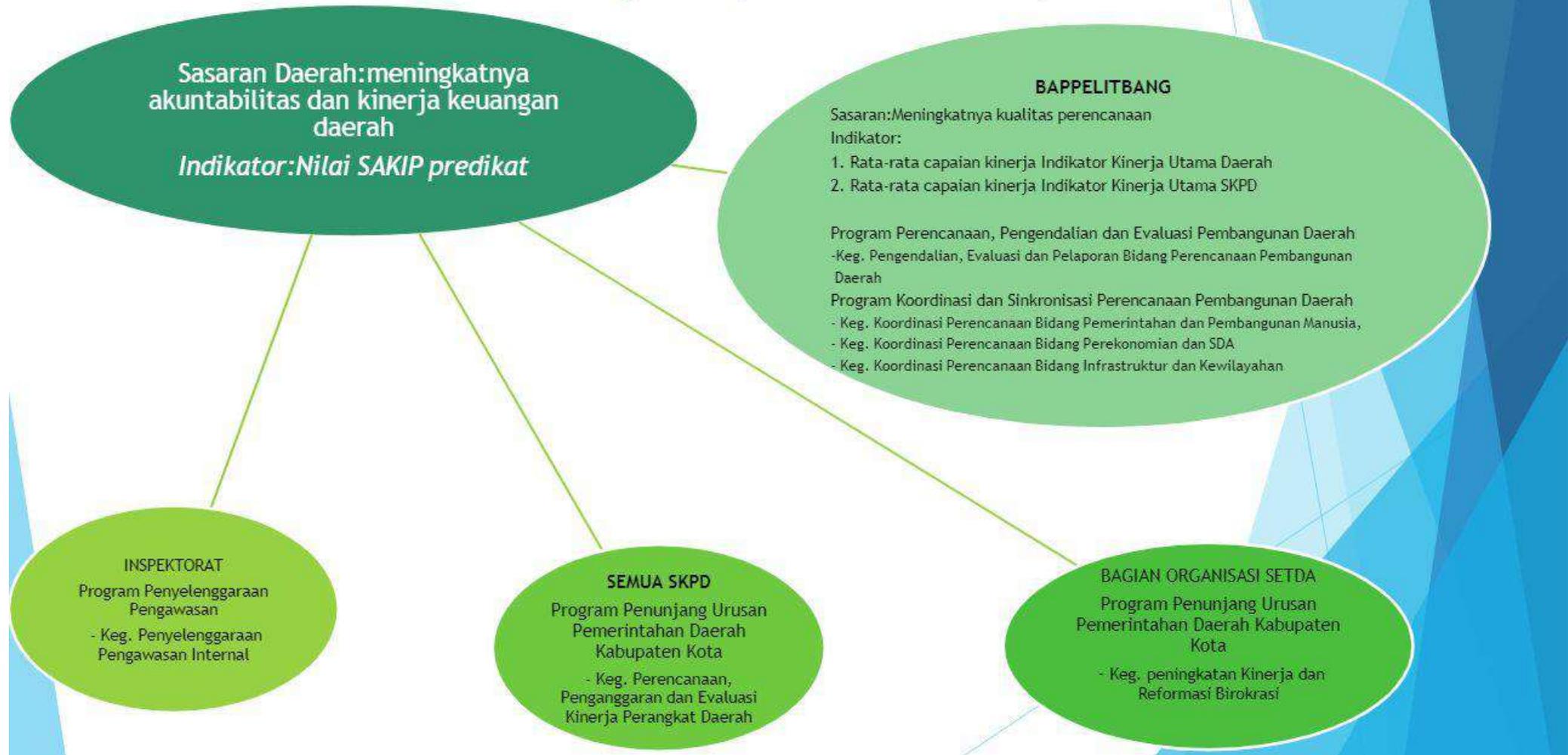


DIKIRIM KE
DINAS PPK - BKPD
INDAGAL
-RAF



CROSS CUTTING BAPPELITBANG

Misi 5 RPJMD “Menedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (*Good And Clean Government*)”





CROSS CUTTING BAPPELITBANG

Misi 5 RPJMD “Mengehendakkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good And Clean Government)”

Sasaran “Meningkatnya hasil kelitbangan”

Indikator:

Persentase hasil kelitbangan yang disitasi

Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

Program Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

“Kajian strategi pengembangan komoditas cabai rawit hiyung”

Dinas Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Dinas Perdagangan

“Program penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri”

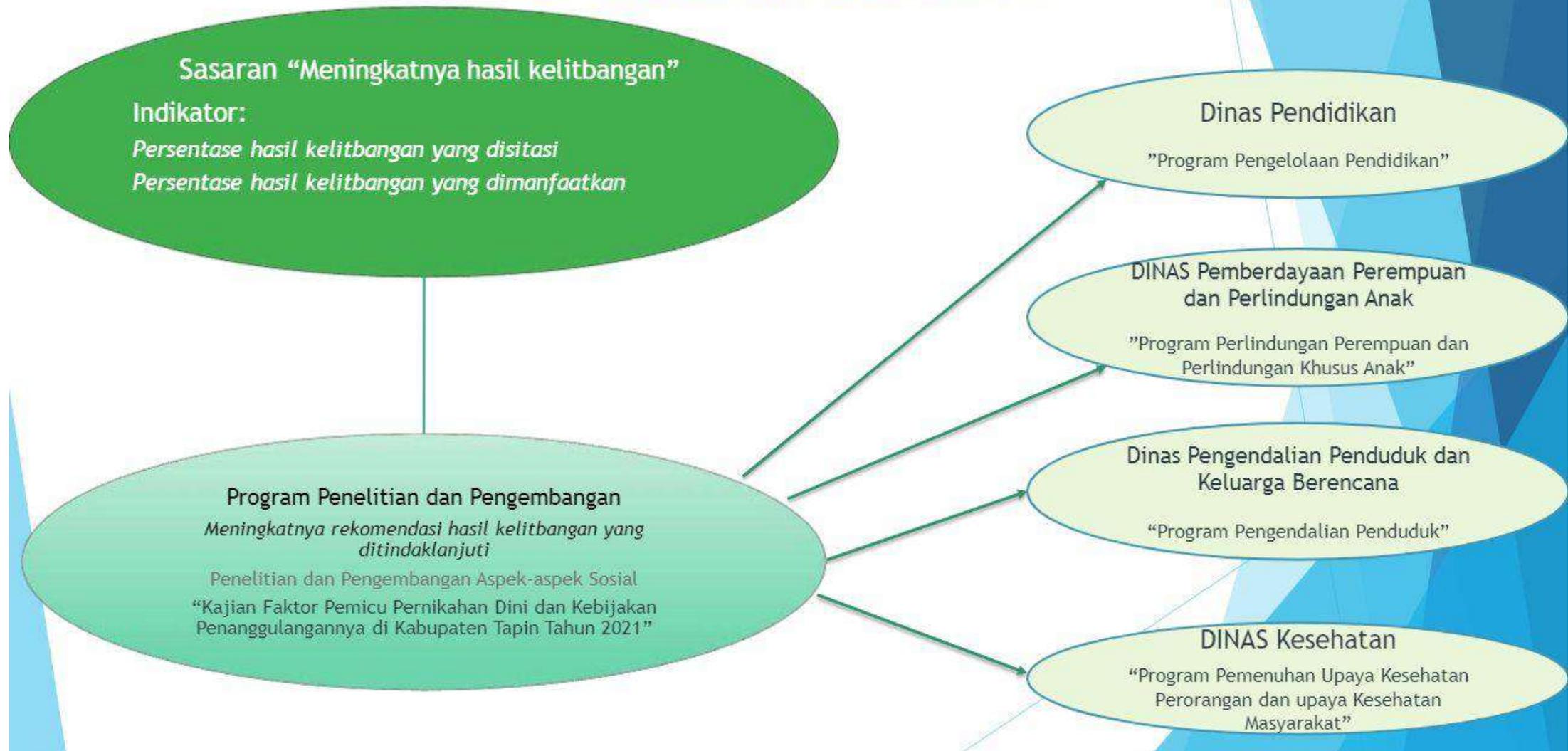
Dinas Perindustrian

“Program Pengembangan UMKM”



CROSS CUTTING BAPPELITBANG

Misi 5 RPJMD “Menedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good And Clean Government)”





CROSS CUTTING BAPPELITBANG

Misi 5 RPJMD “Mengehendahkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good And Clean Government)”

Sasaran “Meningkatnya hasil kelitbangan”

Indikator:

Persentase hasil kelitbangan yang disitasi

Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

Program Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

“inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui website E-STAR atau electronic sustainable tapin research”

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika

UPTD Puskesmas Bakarangan

UPTD Puskesmas Bakarangan

DINAS Kesehatan



**BAPPELITBANG
PEMETAAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN
BERBASIS JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN
PANGAN & AIR BERSIH DI KAB TAPIN
Penelitian dan pengembangan Lingkungan
Hidup**

DINAS PERTANIAN :

1. Penyediaan dan Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian
2. Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
3. Pembentukan dan penyelenggaraan SL Pokt an Tk Kab/Kota

DINAS LINGKUNGAN HIDUP :

1. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi



**BAPPELITBANG
KONDISI EKSTING ARSITEKTUR SPBE
KABUPATEN TAPIN**

Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di Bidang Difusi inovasi dan penerapan Teknologi

DISKOMINFO :
1.DISKOMINFO :

1. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kab/kota berbasis elektronik dan non elektronik
3. Penataksanaan Dan Pengawasan E-GOVERNMENT Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota
4. Penataksanaan Dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kab/kota
5. Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah
6. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE



**BAPPELITBANG
MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN
TAPIN**

Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di
Bidang Difusi inovasi dan penerapan Teknologi

DISKOMINFO :

1. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

DINAS LINGKUNGAN HIDUP :

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Ter integrasi Secara Elektronik
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
3. Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

DINAS SOSIAL :

1. Penjangkauan Anak -Anak Terlantar
2. Rujukan Anak Anak Terlantar
3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5. Penyedia Makanan
6. Penyedia Sandang
7. Penyedia Permakanan
8. Penyedia Sandang
9. Penyedia Alat Bantu
10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
11. Pemerian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual, dan Sosial
12. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lansia Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat
13. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan ,Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu identitas Anak
14. Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
15. Pemberian Layanan Kedaruratan
17. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
18. Pemberian Layanan Rujukan
19. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga



BAPPELITBANG

Pemetaan Tenaga Kerja dan Kontribusinya
Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten Tapin
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

DISKOMINFO :

1. Penatalaksanaan dan
Pengawasan E-GOVERNMENT
dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

DINAS SOSIAL :

1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga



BAPPELITBANG
Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Kabupaten Tapin
Sosialisasi dan Diseminasi hasil-hasil kelitbangan

DISKOMINFO :

1. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah
3. Layanan Hubungan Media
4. Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-GOVERNMENT Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota

DINAS PENDIDIKAN :

1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
3. Program Pembelajaran Berbasis TIK (Pembatik)
4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Lembaga PNF/Kesetaraan, Tidak Lanjut dan Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
5. Pendataan Guru TK,SD dan SMP
6. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD,SD,SMP dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan



BAPPELITBANG
FAKTOR PEMICU PERNIKAHAN DINI DAN
KEBIJAKAN PENANGGULANGANNYA DI
KABUPATEN TAPIN
Penelitian dan Pengembangan

Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota
2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota



LAMPIRAN 14. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN

 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Nomor SOP	:	970/55.a/BAPPELITBANG/2020								
	Tanggal Pembuatan	:	4 Desember 2020								
	Tanggal Revisi	:									
	Tanggal Pengesahan	:	4 Desember 2020								
	Disahkan Oleh		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan  Dr. H. ZAINAL AOLI, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19690214 199403 1 011								
Nama SOP		Penilaian Kinerja									
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana										
1. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahu 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.	1. Menguasai penggunaan komputer dan jaringan 2. Mengetahui tugas dan fungsi SAKIP 3. Memiliki kewenangan dalam Penilaian kinerja 4. Memiliki kemampuan menyusun Penilaian Kinerja										
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan										
1. SOP Penyusunan Renstra 2. SOP Penyusunan Renja 3. SOP Penyusunan LKIP 4. SOP Penyusunan IKU	1. DPA, Renja, RKPd, Renstra, RPJMD dan data kinerja 2. Ruang rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD, ATK,										
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan										
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan Kinerja tidak maksimal dan capaian kinerja tidak tercapai											
SOP : PENILAIAN KINERJA											
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mata Datar			Ket.		
		Kepala Dinas	Setorah	Badan Perencanaan dan Pelaporan	Tim SAKIP	Analisa Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu		Dagup	
1	Identifikasi masalah penilaian kinerja						Format penyusunan penilaian kinerja	15	Merit	Format penyusunan penilaian kinerja	
2	Identifikasi masalah penilaian kinerja						Format penyusunan penilaian kinerja	15	Merit	Format penyusunan penilaian kinerja	
3	Dibuat format penilaian kinerja						Format penyusunan penilaian kinerja	2400	Merit	Format penyusunan penilaian kinerja	
4	Menghimpun format penyusunan data dan pengalihan penilaian kinerja						Soft penilaian kinerja	60	Merit	Soft laporan kinerja	
5	Menyitah dan mengprosedur data penilaian kinerja						Soft penilaian kinerja	60	Merit	Konsep dan uraian penilaian kinerja	
6	Membuat konsep dokumen penilaian kinerja dan menggunakan metode laporan dinas						Konsep Dokumen penilaian kinerja	2880	Merit	Laporan bulanan tahunan	
7	Memeriksa konsep dokumen penilaian kinerja jika hasilnya tercapai dilaksanakan dan digunakan untuk penilaian SAKIP dan jika tidak tercapai maka dibatalkan untuk dibuat rencana lain						Konsep Dokumen penilaian kinerja	5760	Merit	Laporan bulanan tahunan	
8	Melaksanakan dokumen penilaian kinerja						Dokumen penilaian kinerja	60	Merit	Dokumen penilaian kinerja yang telah ditata data dan	
9	Mendokumentasikan dokumen penilaian kinerja untuk penilaian SAKIP						Dokumen penilaian kinerja yang telah dibenarkan	5	Merit	Nilai	



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KABUPATEN TAPIN



LAMPIRAN 15. TINDAK LANJUT SOSIALISASI KERTAS KERJA EVALUASI AKIP

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

Nomor : 050 /M/ Sekrf/Bappelitbang Rantau, 30 September 2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Intern

Kepada Yth Bapak/Ibu:
1. Sekretaris Bappelitbang
2. Kabid Bappelitbang
3. Kasubag Bappelitbang
4. Pejabat Fungsional Bappelitbang
5. Staf Bappelitbang

di -
Tempat

Sehubungan dengan sosialisasi terkait Kertas Kerja Evaluasi (KKE) oleh Inspektorat Kab. Tapin, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin/ 3 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula Bappelitbang
Agenda : **Tindak Lanjut Sosialisasi Hasil KKE AKIP Bappelitbang Tahun 2021.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

Dr. H. Zainal Aqil, ST., MT.
NIP. 19630214 199403 1 011

SUDAH DIPERIKSA
Oleh PPK - SKPD
TANGGAL : / /
SAF

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

Notulen Rapat

Hari, Tanggal : **Senin, 3 Oktober 2022**
Pukul : **09:00 WITA s/d selesai**
Tempat : **Aula Perencanaan Bappelitbang**
Agenda : **Tindak lanjut Sosialisasi KKE**

Sehubungan dengan disosialisasikannya Komponen/Sub komponen/Kriteria penilaian AKIP yang baru, dengan ini diselenggarakanlah sebuah rapat tindak lanjut yang dipimpin oleh Kepala Badan, didampingi oleh Sekretaris dan dihadiri oleh Pejabat Eselon 3, Eselon 4, Pejabat Fungsional dan Staf Bappelitbang.

Diketahui bahwa sebelumnya ada 5 komponen/kriteria penilaian yang diberlakukan dalam penilaian AKIP SKPD yaitu 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; dan 5. Capaian Kinerja, yang mana komponen terakhir, yaitu Capaian Kinerja dihilangkan sehingga kini hanya ada 4 komponen penilaian.

Berdasarkan kertas kerja evaluasi tersebut diketahui bahwa ada beberapa sub komponen yang sebelumnya belum diberlakukan oleh Bappelitbang pada tahun 2021 yaitu: 1. Belum adanya pendekatan yang dipakai dalam penetapan target kinerja yang mana hal ini sudah dilakukan oleh Bappelitbang kab. Tapin dalam penyusunan Perjanjian Kerja tahun 2022; 2. Pelaksanaan *Reward and Punishment* dalam bentuk pemberian/pengurangan TPP berdasarkan pencapaian kinerja yang belum terbentuk (baik dalam bentuk SOP maupun unsur budaya kerja); 3. Belum adanya hasil reuiv internal Lakiip oleh Bappelitbang Kab. Tapin pada tahun 2021; 4. Belum adanya analisis dan evaluasi capaian yang dibandingkan dengan target nasional/internasional; 5. Belum adanya bukti pencapaian kinerja bahwa kinerja telah mempengaruhi budaya kerja; 6. Belum adanya Pedoman/SOP evaluasi AKIP internal; 7. Belum adanya bukti Penggunaan aplikasi pada evaluasi kinerja.

Sehingga, berdasarkan hasil Kertas Kerja Evaluasi tersebut diketahui bahwa nilai AKIP Bappelitbang Kab. Tapin pada tahun 2021 adalah 76.45 atau masuk dalam kategori BB

Notulis,

M. Rizkie L.H

SUDAH DIPERIKSA
Oleh PPK - SKPD
TANGGAL : / /
SAF



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan MT. Heryono No. 4 Telp. (0517) 31608 Fax. (0517) 32241

RANTAU

Kode Pos : 71114

Daftar Hadir

Hari, Tanggal : Senin, 3 Oktober 2022
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Aula Perencanaan Bappelitbang
Agenda : Tindak Lanjut Sosialisasi Kertas Kerja Evaluasi (KKE)

No	Nama	P/L	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zainal Agli	L	Kepala	[Signature]
2	Meidy H. Paryan	L	Sekretari	[Signature]
3	Jufri Khatun	L	Staf	[Signature]
4	Mahdi M.	P	Bappelitbang	[Signature]
5	H. Paryan Sapari	L	Bappelitbang	[Signature]
6	Nor Hafizy	L	-	[Signature]
7	Pisya Magriaty	P	Bappelitbang	[Signature]
8	En Susmi Aor	P	-	[Signature]
9	Azzul Azmi	L	Bappelitbang	[Signature]
10	M. Fauzan Wardhana	L	Bappelitbang	[Signature]
11	Fahriani Ananti	P	-	[Signature]
12	Nurina Z.P	P	-	[Signature]
13	M. Kurni	L	Bappelitbang	[Signature]
14	Rafly P.	L	-	[Signature]
15	Danny Marset	L	-	[Signature]
16	Nisyan	P	-	[Signature]
17	LILI D.	P	Bappelitbang	[Signature]
18	Isnainah	P	Bappelitbang	[Signature]
19	Cuti Arsyah	P	Bappelitbang	[Signature]
20	Istri Rida Ayu	P	Bappelitbang	[Signature]

SUDAH DIPERIKSA
Oleh PPK - SKPD
MUSKAB
TAPIN

21	Ahmad Faisal	L	Bappelitbang	[Signature]
22	Siti Marpuah	P	-	[Signature]
23	Raihan Khairi	L	-	[Signature]
24	Syahala	L	-	[Signature]
25	ARIF R.D	L	Bappelitbang	[Signature]
26	Azzul Anas	L	-	[Signature]
27	Rafiq Muzaffar	L	-	[Signature]
28	Habibi Ibrahim	L	-	[Signature]
29	Zubairi Ytho	L	-	[Signature]
30	Ryan Praboso	L	-	[Signature]
31	Siti Rahmah	P	-	[Signature]
32	AUSTIN DARULIN SEMM	P	-	[Signature]
33	Rahmy Sulita	P	-	[Signature]
34	M. Rizka L.H	L	Bappelitbang	[Signature]
35	M. Puzi	L	-	[Signature]
36	Rafiqan Shor	L	-	[Signature]
37	Rahman Amri	P	-	[Signature]
38	Radhwan Zannah	P	-	[Signature]
39	Sumael	P	-	[Signature]
40	Arif Furiyanto	L	-	[Signature]
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

SUDAH DIPERIKSA
Oleh PPK - SKPD
MUSKAB
TAPIN



SUDAH DIPERIKSA
Oleh PPK - BKPD
TANGGAL: / /
PARAF: /



LAMPIRAN 16. TINDAK LANJUT LHE AKIP BAPPELITBANG TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

Nomor : 050 /M/ Sekr/Bappelitbang Rantau, 10 Oktober 2022
Lampiran :
Perihal : Rapat Intern

Kepada Yth Bapak/Ibu:
1. Sekretaris Bappelitbang
2. Kabid Bappelitbang
3. Kasubbag Bappelitbang
4. Pejabat Fungsional Bappelitbang
5. Staf Bappelitbang

di -
Tempat

Sehubungan dengan disampaikan hasil LHE AKIP Bappelitbang Tahun 2021 oleh Inspektorat Kab. Tapin, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa/ 11 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai II
Agenda : Tindak Lanjut Hasil LHE AKIP Bappelitbang Kab. Tapin Tahun 2021

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Dr. H. Zeinul Huda, ST., MT.
NIP. 19690214 199403 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

Notulen Rapat

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022
Pukul : 09:00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula Perencanaan Bappelitbang
Agenda : Tindak Lanjut Hasil LHE AKIP Bappelitbang Tahun 2021

Sehubungan dengan berakhirnya telah disampaikan Hasil LHE AKIP Bappelitbang Tahun 2021 per tanggal 25 Agustus 2022 oleh Inspektorat Kab. Tapin. Dengan ini Bappelitbang Kab. Tapin menyelenggarakan rapat tindak lanjut atas hasil LHE AKIP tersebut yang dipimpin oleh Kepala Badan, dimoderatori oleh Sekretaris dan dihadiri oleh Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional serta Staf Bappelitbang.

Berdasarkan LHE tersebut ada 12 rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat kepada Bappelitbang untuk bahan perbaikan, yaitu:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dengan membuat analisis pendekatan penetapan target;
2. Melibatkan setiap pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja, minimal terdapat absensi dan nolulen dalam perencanaan kinerja;
3. Melibatkan Pimpinan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja, minimal terdapat absensi dan notulen rapat pengukuran kinerja;
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja;
5. Melaksanakan reviu internal terhadap dokumen laporan kinerja;
6. Menyajikan analisis dan Evaluasi capaian dibanding dengan target nasional/internasional;
7. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai pengaruh terhadap budaya kinerja organisasi;
8. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara menyeluruh, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja;
9. Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bukti nyata dari kedalaman evaluasi;
10. Mendokumentasikan kertas kerja evaluasi sebagai bukti nyata dari kedalaman evaluasi;
11. Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja;
12. Mendokumentasikan bukti tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai langkah nyata dalam implementasi SAKIP.

Beberapa tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sedang berjalan ataupun sudah dilaksanakan. Namun ada salah satu rekomendasi yaitu rekomendasi nomor 6 terkait Menyajikan analisis dan Evaluasi capaian dibanding dengan target nasional/internasional yang belum dapat ditindaklanjuti mengingat perbedaan konteks dalam hal indikator Bappelitbang dan pembandingan dalam tingkat Nasional maupun Internasional.

Notulis,

M. Rizkie L.H.





Daftar Hadir

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022
 Waktu : 09.00 s.d selesai
 Tempat : Aula Perencanaan Bappelitbang
 Agenda : Tindak Lanjut Hasil LHE AKIP Bappelitbang Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	(L/P)	Tanda Tangan
1	Dr. Zainal Ardi	Kepala	L	
2	Nedy H. Nury	Debetur	L	
3	H. Pitar Sefari	Ketub Sekam	L	
4	M. Ichain Kani	Ketoria Sus SDM	L	
5	Mahdi S.	Ketubid Litbang	P	
6	Riny Masriahy	JF. Peneliti	P	
7	Tasar Sru	Staf	P	
8	Lesi Guner	JF. Perencana	L	
9	Isnariah	Staf Bappelitbang	P	
10	Ariga Fibriant	JF. Perencana Mda	L	
11	Eri sari Aor	JF Perencana Mda	P	
12	Rafly P.	Staf Bappelitbang	L	
13	M. Ranga Warshana	Staf Bappelitbang	L	
14	Ahmad Faisa	Staf Bappelitbang	L	
15	LILI D.	Staf	P	
16	Rafly P.	Staf Bappelitbang	L	
17	Nurul Adha A	Staf Bappelitbang	P	
18	Nurholisa A	Staf Bappelitbang	L	
19	Hobibi Ibrahim	Staf Bappelitbang	L	
20	Siti Asyiah	Staf Bappelitbang	P	
21	Riny Masriahy	JF. Peneliti	P	
22	Zhairi Yaka	Staf Bappelitbang	L	
23	Agreni Anni	Staf Bappelitbang	L	
24	Rainan Ichain	Staf Bappelitbang	L	
25	Ryan Prabawa	Programmer	L	

No	Nama	Jabatan	(L/P)	Tanda Tangan
26	Siti Rahmah	Staf	P	
27	Denny Mamesa	---	L	
28	Rania Rizki P.	---	P	
29	FARIDAH PRANI	---	P	
30	Raudhata Zahrah	staf	P	
31	Ruspida Nur	---	L	
32	M. Nurhuda Fauzi	---	L	
33	M. Rizki LH	staf	L	
34	Ranumia Anni	---	P	
35	Tasar Sru KW	Staf	P	
36	Rahmy Gus	staf	P	
37	Martuah	staf	P	
38	Iriyani	staf	P	
39	Siti Asyiah	staf	P	
40	Anwar Annes	staf	L	
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				

SUDAH DIPERIKSA
 CUKUP PPK - SKIPD
 TANGGAL : 11/10/2022
 ANAK :



ANGGARAN
KABUPATEN TAPIN